



LAPORAN

KINERJA

BPS PROVINSI ACEH

2021





LAPORAN

KINERJA

BPS PROVINSI ACEH

2021



LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH TAHUN 2021

No. Publikasi : 11511.2202
Katalog : 1202059.11
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xxii + 150

Naskah:

Fungsi Perencanaan BPS Provinsi Aceh

Penyunting:

Fungsi Perencanaan BPS Provinsi Aceh

Desain Kover oleh:

Fungsi Perencanaan BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh:

© BPS Provinsi Aceh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh





TIM PENULIS

Pengarah	: Nuriah Ismail
Koordinator	: Reza Rezki Pulungan
Penyusun	: Reza Rezki Pulungan Fitri Mulyani
Penyunting	: Reza Rezki Pulungan Fitri Mulyani
Gambar Kulit	: Fitri Mulyani
Tata Letak dan Infografis	: Fitri Mulyani



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh*





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Aceh sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Provinsi Aceh sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Provinsi Aceh.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Aceh tahun 2021. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Seluruh pimpinan BPS Provinsi Aceh mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 23 Februari 2022
**Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh**

Nuriah Ismail, S.E.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Aceh	5
1.4 Sumber Daya Manusia BPS Provinsi Aceh	8
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	11
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis BPS Provinsi Aceh 2020-2024	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021	41
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh	73
3.3 Capaian Kinerja 2020 terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024	78
3.4 Prestasi Tahun 2021	97
3.5 Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Aceh Tahun 2021	101
3.6 Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021	113
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2021	121
BAB IV PENUTUP	125
4.1 Tinjauan Umum	127
4.2 Tantangan dan Kendala Umum	128
4.3 Saran Tindak Lanjut	129
LAMPIRAN	131



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.....	xiv
Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Jabatan Tahun 2021.....	9
Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	10
Tabel 4. Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Golongan Tahun 2021	10
Tabel 5. Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Usia Tahun 2021	10
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	27
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021	35
Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Pertama.....	43
Tabel 9. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Kedua.....	51
Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Ketiga.....	59
Tabel 11. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Keempat.....	62
Tabel 12. Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Aceh Tahun 2017-2021.....	73
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020 dengan 2021.....	75
Tabel 14. Hasil Implementasi SAKIP BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.....	78
Tabel 15. Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021 terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024.....	79
Tabel 16. Realisasi Belanja Operasional BPS Provinsi Aceh Tahun 2020 dan 2021.....	114
Tabel 17. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021.....	117
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	121
Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja pada BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	122
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis BPS Provinsi 2021.....	123





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021.....	xiii
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Pendidikan Tahun 2021 (Persen)	8
Gambar 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2014.....	81
Gambar 4. Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Menurut Aplikasi SMART Tahun 2021	116





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Provinsi Aceh	113
Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2024.....	114
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	115
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	118
Lampiran 5. Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021.....	120
Lampiran 6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	121
Lampiran 7. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	121
Lampiran 8. Jumlah Pegawai Menurut Golongan di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	122
Lampiran 9. Jumlah Pegawai Menurut Usia di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	122
Lampiran 10. Kegiatan BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	123
Lampiran 11. <i>Advanced Release Calender</i> (ARC) Publikasi BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	126
Lampiran 12. Daftar Metadata Kegiatan Statistik Sektor dan Khusus yang disampaikan K/L/D/I kepada BPS Provinsi Aceh Tahun 2021.....	129



RINGKASAN EKSEKUTIF

01

Tujuan 1



Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan



110%

02

Tujuan 2



Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN



110%

03

Tujuan 3



Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN



120%

04

Tujuan 4



Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi



110%



Capaian Realisasi Anggaran

99,32%



Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh

111,43%



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS yaitu:

- (a) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- (b) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- (c) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
- (d) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Selanjutnya Misi BPS ini dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan statistik sebagai berikut:

- Meningkatkan akurasi data;
- Memastikan kemutakhiran data;
- Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik;
- Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
- Menyediakan/membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektorial;
- Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektorial;
- Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia;
- Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional;
- Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektorial;
- Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK;
- Melakukan pembinaan statistik sektorial ke seluruh K/L/D/I;

- Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik;
- Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
- Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik;
- Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja;
- Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien;
- Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.

Laporan Kinerja BPS Provinsi Aceh disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Aceh pada tahun 2021 telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS Provinsi Aceh 2020-2024 yang meliputi:

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

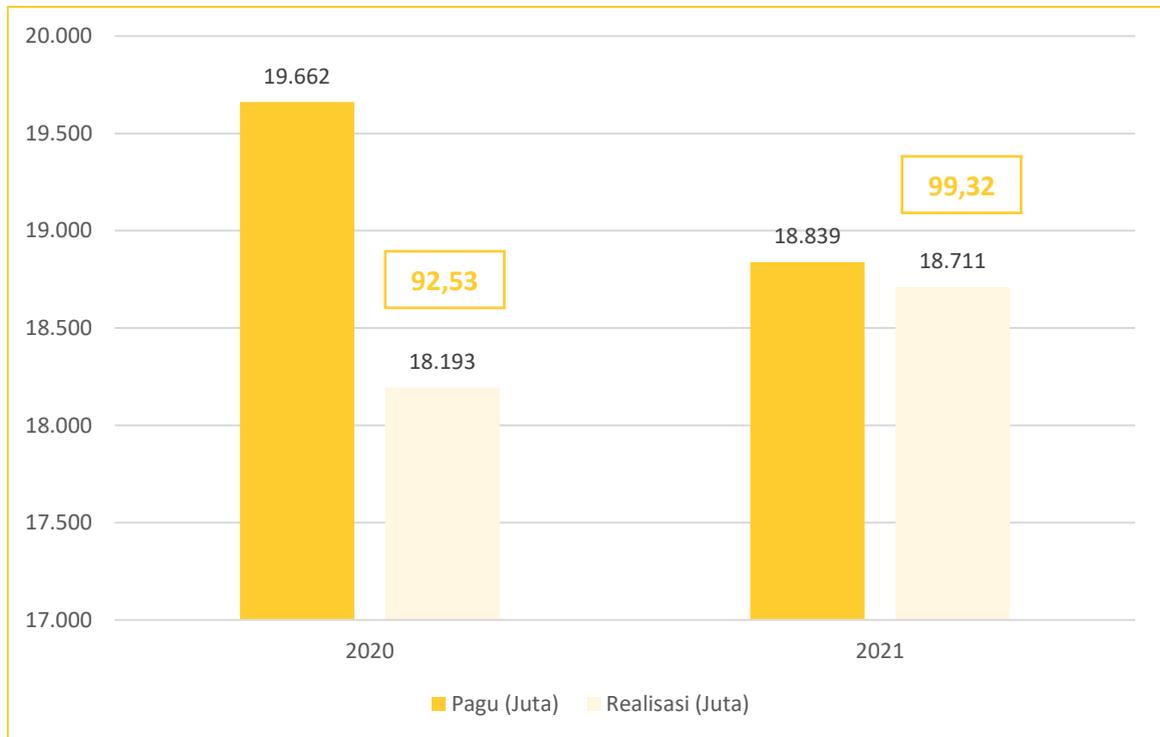
Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, dan pada periode tahun 2021 ditandai dengan terpenuhinya target tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2021 BPS Provinsi Aceh menetapkan dua program utama, terdiri dari:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); dan
2. Program Dukungan Manajemen (DUKMAN).

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Anggaran dengan nilai sebesar Rp.18.839.050.000,- dan realisasinya mencapai Rp.18.711.121.516,- atau sebesar 99,32 persen. Persentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2020 yang

hanya mencapai 92,53 persen.

Gambar 1.
**Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran BPS Provinsi Aceh
Tahun 2020-2021**



Dalam melaksanakan program-program BPS Provinsi Aceh tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ke depan. Tantangan tersebut berupa:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data serta tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data;
2. Faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan;
3. *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh;
4. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik.
5. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Aceh.
6. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh untuk mengatasi tantangan yang dihadapi yaitu dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, mengoptimalkan kegiatan pengawasan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan terus berupaya meningkatkan kinerja pegawai.

Tabel 1.
Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja (1)	Sasaran Strategis (2)	Capaian 2020 (%)	Capaian 2021 (%)
Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS 1.1: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110	110
Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS 1.2: Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	120	110
Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS 1.3: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	0,00	120
Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS 1.4: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	95,34	110
Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh		81,33	111,43

Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Aceh terkait dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum realisasi pencapaian kinerja BPS Provinsi Aceh menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh tahun 2021 sebesar 111,43 persen, dimana realisasi semua tujuan strategis BPS Provinsi Aceh tahun 2021 melebihi capaian target. Rata-rata capaian kinerja BPS Provinsi Aceh pada tahun 2021 juga meningkat 30,1 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Provinsi Aceh Tahun 2021 sudah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS dengan baik.

BAB 1

PENDAHULUAN

AMANAT

PP No.8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah dan Perpres RI No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

LATAR BELAKANG



TUJUAN



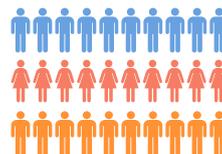
EVALUASI

capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Aceh selama tahun 2021

PENDIDIKAN

Mayoritas SDM BPS Provinsi Aceh bergelar sarjana (58,54%)

SDM BPS PROVINSI ACEH



POTENSI



INOVASI

E-SAKIP, SIPADU, SAKA, NGEZOOM, ODOJ, DATA KITA, SIKEPO, PORTAL RB, NAPELO, SIDINDA



1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi yang merupakan instansi vertikal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh merupakan salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah. BPS Provinsi Aceh mempunyai tugas pokok menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun ke depan, BPS Provinsi Aceh telah menuangkan rencana kerja dan dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Provinsi Aceh telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS RI yang dilaksanakan setiap tahun.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Provinsi Aceh menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Aceh sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS 2021 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang tahun 2021. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi Aceh kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan, tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Aceh selama tahun 2021. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal apa saja yang menjadi kontribusi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai atau bahkan melebihi target, dan juga untuk mengetahui berbagai permasalahan dan kendala yang mengakibatkan ketidaktercapaian target disepanjang tahun 2021, selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.

1.3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Aceh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS Provinsi Aceh yang juga menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS Provinsi Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPS RI dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar di wilayah Provinsi Aceh. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d) Penetapan sistem statistik nasional;
- e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
4. Deputi Bidang Statistik Sosial
5. Deputi Bidang Statistik Produksi
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisa Statistik
8. Inspektorat Utama
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
10. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
11. Instansi Vertikal

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS, sedangkan BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien, maka struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, meliputi:

a. Kepala

Kepala BPS Provinsi Aceh mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi Aceh serta membina aparatur BPS Provinsi Aceh agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

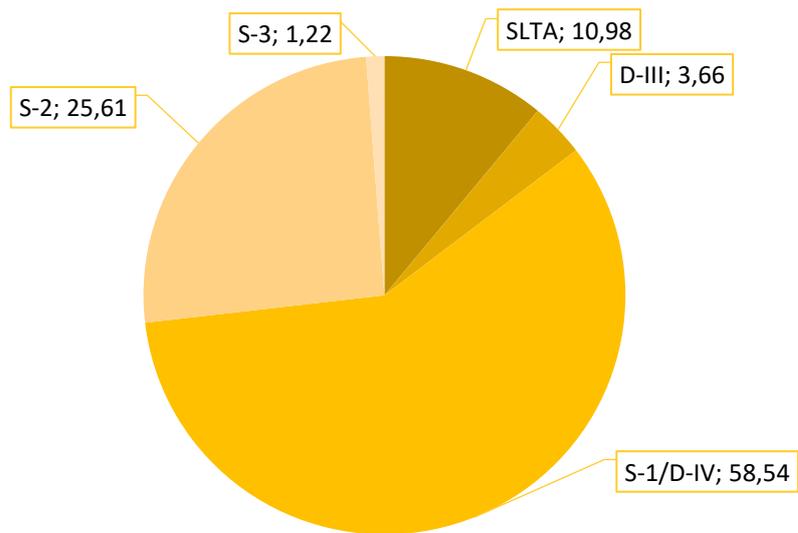
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Aceh sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Secara rinci bagan organisasi BPS Provinsi Aceh terdapat pada **Lampiran 1**.

1.4. Sumber Daya Manusia BPS Provinsi Aceh

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, BPS Provinsi Aceh senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Pada Desember 2021, kualitas SDM BPS Provinsi Aceh relatif cukup baik tercermin dari tingkat pendidikan pegawai yang mayoritas setara sarjana (S-1), yaitu sebanyak 58,54 persen (48 pegawai dari 82 total pegawai). Komposisi SDM BPS Provinsi Aceh berdasarkan pendidikan lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2.
Persentase Jumlah Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Pendidikan Tahun 2021 (persen)

Sedangkan, menurut posisi jabatan, BPS Provinsi Aceh hanya memiliki 1 (satu) orang pejabat struktural dari yang seharusnya 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Kepala BPS Provinsi dan 1 (satu)

orang Kepala Bagian Umum, hal ini dikarenakan pada November 2021, Bapak Ihsanurijal, S.Si, M.Si., selaku Kepala BPS Provinsi Aceh sebelumnya dimutasikan ke BPS RI menjadi Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, sehingga saat ini terjadi kekosongan jabatan Kepala BPS Provinsi Aceh, sisanya merupakan pejabat fungsional tertentu (Fungsional Analis Anggaran, Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN, Fungsional Pranata Keuangan APBN, Fungsional Analis SDM Aparatur, Fungsional Arsiparis, Fungsional Penata Laksana Barang, Fungsional Analis Kepegawaian, Fungsional Statistisi, Fungsional Pranata Komputer, dan Fungsional Umum). Secara rinci profil pegawai BPS Provinsi Aceh sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Jabatan Tahun 2021

Jabatan (1)	Jumlah (orang) (2)	Persentase (3)
1. Pejabat Struktural	1	1,22
2. Pejabat Fungsional Analis Anggaran	1	1,22
3. Pejabat Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN	1	1,22
4. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN	1	1,22
5. Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur	1	1,22
6. Pejabat Fungsional Arsiparis	1	1,22
7. Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang	1	1,22
8. Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	1	1,22
9. Pejabat Fungsional Statistisi	40	48,78
10. Pejabat Fungsional Pranata Komputer	3	3,66
11. Pejabat Fungsional Umum	31	37,80
Jumlah	82	100,00

Tabel 3.
Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Jabatan (1)	Jumlah (orang) (2)	Jenis Kelamin			
		Lk (3)	% (4)	Pr (5)	% (6)
1. Pejabat Struktural	1	-	-	1	100,00
2. Pejabat Fungsional Analisis Anggaran	1	1	100,00	-	-
3. Pejabat Fungsional Analisis Pengelola Keuangan APBN	1	-	-	1	100,00
4. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN	1	1	100,00	-	-
5. Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur	1	-	-	1	100,00
6. Pejabat Fungsional Arsiparis	1	1	100,00	-	-
7. Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang	1	-	-	1	100,00
8. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	1	-	-	1	100,00
9. Pejabat Fungsional Statistisi	41	19	46,34	21	51,22
10. Pejabat Fungsional Pranata Komputer	3	3	100,00	-	-
11. Pejabat Fungsional Umum	31	17	54,84	14	45,16
Jumlah	82	42	51,22	40	48,78

Tabel 4.
Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Golongan Tahun 2021

Golongan (1)	Jumlah (orang) (2)	Persentase (3)
IV	12	14,63
III	68	82,93
II	2	2,44
Jumlah	82	100,00

Tabel 5.
Komposisi Pegawai BPS Provinsi Aceh Menurut Usia Tahun 2021

Usia (1)	Jumlah (orang) (2)	Persentase (3)
> 50	11	13,41
41-50	14	17,07
31-40	50	60,98
<=30	7	8,54
Jumlah	82	100,00

1.5. Potensi dan Permasalahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional setiap tahun, yaitu Politeknik Statistika STIS. BPS Provinsi Aceh menjadi perpanjangan BPS dalam penerimaan mahasiswa Politeknik Statistika STIS, perlu memberikan dukungan dengan melakukan promosi lebih lagi ke SMU setempat maupun Kabupaten/Kota untuk menjaring calon mahasiswa Politeknik Statistika STIS baru asal Aceh lebih banyak setiap tahunnya. Ditinjau dari sisi SDM, pada tahun 2021 SDM di BPS Provinsi Aceh didominasi oleh pegawai berpendidikan minimal DIV/S1. Hal ini merupakan potensi tersendiri bagi BPS Provinsi Aceh. Dengan pegawai yang berpendidikan tinggi diharapkan dapat mendukung BPS Provinsi Aceh dalam penyediaan data statistik yang berkualitas khususnya di wilayah Provinsi Aceh sesuai dengan visi BPS.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Aceh merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. BPS Provinsi Aceh telah melakukan serangkaian inovasi TIK baik untuk kepentingan internal antara lain program aplikasi **E-SAKIP** sebagai sarana untuk monitoring proses pelaksanaan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja hingga capaian kinerja, **SIPADU** (Sistem Pengendalian Administrasi Terpadu) sebagai sarana penanganan administrasi, **SAKA** (Sistem Aplikasi Keuangan Aceh) yang bertujuan untuk mengoptimalkan serapan anggaran, salah satunya digunakan untuk mengatasi pengalokasian pembayaran honor kegiatan, **Ngezoom** sebagai sarana untuk permintaan pemakaian lisensi aplikasi *zoom* agar jadwal *zoom meeting* tersusun dan menghindari jadwal yang berlawanan, **ODOJ** (*One Day One Juz*) yaitu aplikasi tadarus bersama untuk meningkatkan spiritual dan kebersamaan selama ramadhan, **Data Kita** yaitu inovasi untuk optimalisasi pekerjaan terkait data-data yang akan dirilis untuk meminimalisir kesalahan dan untuk efisiensi waktu, **SIKEPO** berupa sistem penilaian pegawai sekaligus alat bantu dalam jabatan fungsional, **ABAH** (Administrasi Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh) sebagai sarana untuk memudahkan dalam administrasi di BPS Provinsi Aceh salah satunya juga berfungsi untuk monitoring jumlah serapan anggaran BPS se-Provinsi Aceh, **Portal RB** sebagai wadah pengumpulan dokumentasi dan laporan reformasi birokrasi secara optimal dan menyeluruh.

Sistem-sistem yang telah dikembangkan oleh tim di BPS Provinsi Aceh dapat diakses melalui https://webapps.bps.go.id/aceh/serasi_bps_aceh/. Selain itu, terdapat pula aplikasi yang dikembangkan oleh BPS Provinsi Aceh yang dapat diakses melalui aplikasi android, yaitu **Napelo** merupakan aplikasi untuk melihat rincian gaji dan tunjangan kinerja pegawai sebagai bentuk transparansi keuangan, dan **SIDINDA** sebagai aplikasi pelayan data dan indikator statistik distribusi yang dapat diakses melalui aplikasi android.

Pada tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Aceh pada 2021 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi. BPS Provinsi Aceh telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2020-2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Provinsi Aceh harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Provinsi Aceh dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua terus meningkat.

Tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kualitas data dan ragam informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Aceh adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Provinsi Aceh dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui. Koordinasi dengan penguasa wilayah setempat secara berkesinambungan juga memudahkan petugas mendapatkan data dan mensosialisasikan kegiatan. Hal ini juga seharusnya bisa diatasi dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 19 yang menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan statistik (dalam hal ini adalah BPS) berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.

Untuk mewujudkan sistem dan infrastruktur yang baik di BPS Provinsi Aceh harus didukung dengan pengadaan barang-barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat. Pengadaan barang-barang TIK tersebut harus memperhatikan alokasi pagu yang diterima BPS setiap tahun anggarannya. Sehingga BPS Provinsi Aceh harus menyusun *roadmap* yang jelas terkait proses pengadaan tersebut.

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan daerah pemekaran.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS Provinsi Aceh memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi.

Disisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *big data* dan data administratif) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya big data tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain:

1. Pengurangan biaya,
2. Pengurangan waktu,
3. Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
4. Pengambilan keputusan yang cepat.

Secara teknis, kebijakan *one data* yang dirumuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan tantangan baru bagi BPS termasuk BPS Provinsi Aceh. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Provinsi Aceh faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Provinsi Aceh telah teridentifikasi, dan berusaha di tanggulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/*briefing* untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* yang dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik dan lain sebagainya. Sangat dianjurkan juga agar setiap pegawai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Berbagai hal yang telah ditempuh ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Provinsi Aceh saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Provinsi Aceh masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan/*Strengths*
 - a. Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level kabupaten/kota;
 - b. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai;
 - c. Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik; dan
 - d. Pemanfaatan big data bisa dilakukan dengan beberapa exercise untuk memastikan posisi big data dan official statistic.
2. Kelemahan/*Weaknesses*
 - a. Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi);
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal;
 - c. Keterbatasan kanal diseminasi; dan
 - d. Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia.

Faktor Eksternal

3. Peluang/*Opportunities*
 - a. BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan);
 - b. Big data dan data administratif yang sangat banyak dan beragam;
 - c. Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil;
 - d. Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;

- e. BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah;
- f. Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis; dan
- g. Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan stakeholder tertentu.

4. Ancaman/*Threats*

- a. Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data;
- b. Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas;
- c. Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden); dan
- d. Tingginya respondent burden (beban responden).

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2021.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2021, Perkembangan Capaian Kinerja BPS terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020-2024, Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2021, Kegiatan Prioritas BPS 2021, Upaya Efisiensi BPS 2021, dan Realisasi Anggaran tahun 2021.
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



TUJUAN 1

Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan



TUJUAN 2

Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan SSN



TUJUAN 3

Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN



TUJUAN 4

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasai



2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Aceh 2020-2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mengacu pada Renstra BPS 2020-2024 dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka menengah BPS yang sekaligus mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

BPS Provinsi Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup wilayah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, BPS Provinsi Aceh melakukan koordinasi dan kerjasama untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Rencana Strategis BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala regional yang berlaku selama kurun waktu 2020-2024.

Visi BPS Provinsi Aceh

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020–2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

Misi BPS Provinsi Aceh

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Provinsi Aceh dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretibility* (interpretibilitas).

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrase dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS Provinsi Aceh tahun 2020-2024

T U J U A N	SASARAN STRATEGIS TEKNIS	
(1)	(2)	
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1.	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2.	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.	Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.	SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

Kebijakan BPS Provinsi Aceh

Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Provinsi Aceh mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

a) Meningkatkan akurasi data, melalui :

- i. Integrasi proses bisnis; serta
- ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.

b) Memastikan kemutakhiran data dengan :

- i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
- ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan

- iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
 - d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
 - e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE.
 - f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.
 - g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
 - h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. *Penyelenggaraan capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)
 - iii. *Pengembangan 20 JP/tahun* bagi setiap pegawai
- b) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
 - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi
- c) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional

- d) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- e) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- f) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- g) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

- h) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem

Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Untuk dapat mencapai visi dan misi Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, maka untuk tahun 2021 dilaksanakan dua program, yang meliputi satu Program Teknis dan satu Program Generik. Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Provinsi Aceh secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- Pengembangan dan Analisis Statistik;
- Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;

- Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada awal tahun 2021 ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Aceh. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur Indikator Kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 terhadap target.

Tabel 7.
Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
SS1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	80,00
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	1,79
2.Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100,00
	2.1.2 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	15,00
3.Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
SS3.1 Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	20,00
4.Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SS4.1 SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	71,30
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	85,00

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap bulanan dan triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Aceh kepada Kepala BPS Republik Indonesia atas penggunaan anggaran BPS sepanjang tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Provinsi Aceh. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Provinsi Aceh adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas.

Selain dimensi kualitas, BPS Provinsi Aceh yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan.

Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.

5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

6. Kerahasiaan Data Individu

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

7. Transparansi Tatacara Perstatistikan

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.

9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi.

10. Kerjasama Internasional

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan resmi di semua negara.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Capaian kinerja BPS Provinsi Aceh untuk tahun 2021 merupakan capaian tertinggi selama Tahun 2017-2021, yakni mencapai **111,43** persen.



Realisasi Anggaran

99,3%

Serapan anggaran BPS Provinsi Aceh Tahun 2021 mencapai **99,32** persen.

Prestasi

Beragam penghargaan yang diterima BPS Provinsi Aceh Tahun 2021, baik dari internal maupun eksternal BPS





Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban BPS Provinsi Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Provinsi Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2021, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

3.1 Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan pada awal tahun, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 seperti pada **Tabel 6**.

3.1.1. Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

Capaian kinerja BPS Provinsi Aceh tahun 2021 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Provinsi Aceh pada tahun 2021, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka BPS Provinsi Aceh telah merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Tujuan pertama yang ingin dicapai BPS Provinsi Aceh yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” diukur dengan indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional” dan indikator “Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”. Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Data dihasilkan oleh BPS Provinsi Aceh, meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik

Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik.

Tabel 8.
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Pertama

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas				
Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	80,00	100,00	120,00
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	1,79	1,79	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				110,00

Tujuan strategis pertama “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” mempunyai satu sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Berdasarkan **Tabel 8.** rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 110 persen. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dan usaha dari semua pihak dalam hal ini semua Fungsi teknis yang didukung dengan pengelolaan administrasi yang tepat sehingga dapat mencapai nilai realisasi yang memuaskan. Nilai rata-rata capaian indikator sasaran diperoleh dari :

1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator sasaran strategis pertama dari tujuan pertama ini diperoleh dari Survei Kebutuhan Data (SKD). Sejak tahun 2019, pengumpulan data SKD dilaksanakan dengan metode CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*). Penggunaan metode ini semakin membantu pada pelaksanaan SKD tahun 2020 karena dimulainya kondisi adaptasi kebiasaan baru. Berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih terjadi pada tahun 2021, maka pengumpulan data survei dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan metode *online*. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan serta penyesuaian pelaksanaan survei senantiasa dilakukan. Indikator ini menguraikan mengenai perbandingan jumlah konsumen menurut penggunaan data BPS sebagai perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional terhadap jumlah konsumen yang menjadi responden SKD di BPS Provinsi Aceh.

IKU persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional diukur dengan formula:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

Y = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS

Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi teknis yaitu Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Fungsi Statistik Produksi. Sumber data untuk indikator ini berasal

dari Survei Kebutuhan Data (SKD).

Berdasarkan hasil SKD 2021, konsumen yang berasal dari instansi Pemerintah Daerah menduduki posisi terbanyak kedua yakni sebesar 22,86 persen. Sedangkan, persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional tahun 2021 adalah sebesar 100,00 persen dengan target 80,00 persen, sehingga capaian kerjanya sebesar 120,00 persen. Capaian kinerja indikator persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dan usaha dari semua pihak dalam hal ini semua fungsi teknis yang didukung dengan pengelolaan administrasi yang tepat sehingga dapat mencapai nilai realisasi yang melebihi target.

Masalah/kendala yang dihadapi

Di tahun 2021, munculnya pandemi Covid-19 memberikan hambatan dari sisi pelayanan kepada pengguna data dikarenakan proses bisnis pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui tatap muka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh di tahun 2021 khususnya untuk mencapai target indikator sasaran strategis pertama dari tujuan pertama.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Beberapa hal yang telah diupayakan untuk mencapai target antara lain:

- a) Memperluas pelayanan data secara online dengan launching fitur *live chat* data pelayanan statistik terpadu. Fitur *live chat* ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk melakukan konsultasi dan permintaan data yang langsung akan direspon oleh petugas pelayanan statistik terpadu.
- b) Meningkatkan pelayanan data secara online, seperti *whatsapp*,

email, telepon dan *live chat website* serta meningkatkan respon dengan kualitas yang baik pada media *online* tersebut.

- c) Pada era *New Normal*, BPS Provinsi Aceh Kembali membuka PST dengan menyesuaikan protokol Kesehatan dan perubahan jam layanan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung pada pelayanan tatap muka.
- d) BPS Provinsi Aceh juga membentuk tim pelayanan, diseminasi, dan pengelolaan *website*, agar memudahkan koordinasi terhadap *subject matter* dan meningkatkan pelayanan statistik lebih berkualitas.

Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a) Membuat data BPS agar lebih mudah diakses dan dicari khususnya melalui *website*. Senantiasa memperbaharui tabel statistik pada *website* dengan data-data terbaru, mengemas data statistik menjadi lebih menarik dengan memperbanyak infografis dan disebarakan melalui *website* ataupun sosial media resmi BPS Provinsi Aceh, rutin mengunggah Berita Resmi Statistik (BRS) melalui *website*, dan juga mensosialisasikan data BPS secara intensif khususnya kepada K/L/D/I yang ada di BPS Provinsi Aceh. Dengan beberapa strategi tersebut, diharapkan pengguna data khususnya yang berasal dari K/L/D/I mengetahui ketersediaan data yang ada di BPS dan dapat dijadikan referensi dalam perencanaan pembangunan.
- b) Meningkatkan cakupan responden SKD yang berasal dari dinas/instansi agar lebih mengetahui manfaat dari diperolehnya data BPS.

2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Bagi pemerintah, tersedianya data yang berkualitas sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Agar para perancang survei dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan perencanaan survei-survei sejenis dimasa mendatang, maka perlu diketahui kualitas data hasil suatu survei. Salah satu ukuran akurasi data adalah *Relative Standard Error (RSE)*.

Indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional merupakan komitmen BPS dalam menerapkan standar kualitas data dalam publikasi yang dihasilkan oleh BPS. Formulanya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi

Y = Jumlah publikasi yang dihasilkan

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Fungsi Statistik Produksi.

Pada tahun 2021 indikator ini ditargetkan sebesar 1,79 persen yang ditetapkan berdasarkan dari pertimbangan publikasi tahun 2020 yang terdapat tabel RSE, yaitu publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat. Realisasi indikator kedua pada tujuan dan sasaran strategis pertama sebesar 1,79 persen. Dengan demikian, capaian kinerjanya menjadi 100,00 persen. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan satu-satunya publikasi statistik yang ditargetkan untuk menerapkan standard akurasi karena hanya Seksi Statistik

Kesejahteraan Rakyat yang pernah mengikuti pelatihan perhitungan RSE hasil survei secara terstruktur untuk setiap kegiatan survei di BPS.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa depan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator kedua dari tujuan dan sasaran pertama, di antaranya:

1. Salah satu ukuran akurasi data adalah *Relative Standard Error* (RSE). Survei yang dilaksanakan dengan *Simple Random Sampling* (SRS) dapat dihitung dengan mudah. Akan tetapi, survei-survei di BPS tidak pernah menggunakan SRS, melainkan menggunakan rancangan *multi-stage cluster sampling* sebagai pengganti SRS. *Multi-stage cluster sampling* merupakan pilihan terbaik dalam berbagai situasi lapangan. Hal ini mengakibatkan perhitungan *standard error* dan RSE berdasarkan rancangan ini sulit dilakukan. Selain itu, tidak seluruh metodologi survei yang dilakukan di BPS terinformasikan dengan baik sampai ke daerah;
2. Meskipun Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat pernah mengikuti pelatihan perhitungan RSE, tidak membuat perhitungan RSE menjadi mudah dilakukan, masih terdapat kendala pada perhitungan RSE untuk publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat karena variabel yg ada dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sangat banyak, sedangkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat baru satu kali mengadakan pelatihan penghitungan RSE dan hanya mencoba satu variabel. Padahal, SUSENAS bisa menyediakan ratusan variabel.

Awalnya, tahun 2021 Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat ingin melakukan perjalanan dinas ke pusat untuk berkonsultasi dan belajar penghitungan RSE, tetapi karena pandemi Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke pusat.

3. Waktu penyusunan publikasi yang sangat terbatas, hal ini disebabkan pengolahan data (proses *editing* dan validasi) yang Panjang membuat ketersediaan data publikasi menjadi lebih lama dan berakibat mendekati jadwal ARC, bahkan hingga publikasi telah terbit, terdapat koreksi *raw data* oleh BPS RI, sehingga perlu Menyusun tabel erata untuk perbaikan publikasi.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Meski sulit, BPS Provinsi Aceh tetap berupaya membuat publikasi yang memuat ukuran kualitas suatu data (RSE). Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah, diantaranya:

1. Mengupayakan untuk belajar mandiri dan berkonsultasi *online* dengan BPS RI terkait perhitungan RSE.
2. Sebelum Menyusun RSE, terlebih dahulu Menyusun layout publikasi sebagai dasar penyusunan publikasi, sehingga penyusunan publikasi dapat lebih cepat.
3. Melakukan kaji ulang jadwal ARC publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh dengan harapan terdapat waktu yang cukup dalam melakukan penyusunan publikasi, sehingga dapat diatur pada akhir tahun.

Rencana Aksi

1. Berkoordinasi dengan *subject matter* di BPS RI terkait ketersediaan data RSE agar dapat dimunculkan dalam banyak publikasi statistik di BPS.

2. Meningkatkan kualitas publikasi dengan memperbanyak infografis, mempertajam analisis serta membuat layout yang semakin menarik. Hal ini merupakan salah satu komitmen BPS Provinsi Aceh untuk meningkatkan keragaman dan kualitas data serta informasi yang disajikan dalam publikasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.
3. Fungsi Statistik Kesejahteraan Rakyat merencanakan untuk mengadakan *sharing knowledge* perihal perhitungan RSE, harapan ke depannya agar lebih banyak lagi publikasi yang memuat standar akurasi data.

Berdasarkan **Tabel 8**, rata-rata capaian indikator sasaran pada tujuan pertama pada tahun 2021 mencapai 110 persen. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan kedua adalah sebesar 110 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan kedua “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas” telah tercapai.

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN”. Tujuan ini memuat misi BPS Provinsi Aceh untuk meningkatkan peran sebagai pusat rujukan statistik dalam terselenggaranya SSN dan juga sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Provinsi Aceh. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai pusat rujukan statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Pada tujuan kedua ini juga perana BPS Provinsi Aceh sebagai Pembina data di wilayah Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia semakin terlihat. Sasaran strategis pada tujuan kedua yaitu “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN”.

Tabel 9.
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Kedua

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN				
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100,00	100,00	100,00
Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	15,00	35,00	120,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				110,00

Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu indikator “Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik” dan “Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar”. Capaian indikator sasaran strategis untuk tujuan kedua tersebut disajikan pada **Tabel 9**.

Berdasarkan **Tabel 9**, rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 110 persen, nilai ini diperoleh dari 2 (dua) indikator sasaran:

1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.

Indikator ini menguraikan mengenai persentase tindak lanjut rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan oleh BPS dan dilaksanakan oleh K/L/D/I. Tercapainya indikator ini menunjukkan keberhasilan BPS dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina

Statistik sesuai Perpres Satu Data Indonesia. Setiap K/L/D/I yang akan melaksanakan kegiatan statistik wajib mengajukan rekomendasi kegiatan statistik terhadap pembina data, yaitu BPS setempat. Setiap pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dilaporkan di sistem yang terpusat dinamakan Romantik Online. Pengajuan rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh BPS setempat hingga K/L/D/I mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan juga mendapatkan status kelayakan kegiatan statistik. Hasil rekomendasi kegiatan statistik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L/D/I.

Penanggungjawab dari indikator ini adalah Fungsi IPDS. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik

Y = Jumlah K/L/D/I yang diberikan rekomendasi kegiatan statistik

Realisasi indikator K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik pada tahun 2021 adalah sebesar 100 persen dari target 100 persen. Dengan demikian, capaian indikator sasaran strategis pertama dari tujuan kedua telah tercapai sebesar 100 persen. K/L/D/I yang telah diberikan dan melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSP.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih terdapat kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di

masa depan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator pertama dari tujuan dan sasaran kedua, di antaranya:

1. Kurangnya pengetahuan OPD yang melaksanakan kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan.
2. Sebagian besar kegiatan dinas masih berupa kompilasi administrasi sehingga tidak wajib meminta rekomendasi ke BPS.
3. Kurangnya sumber daya di fungsi IPDS serta kurangnya pemahaman pegawai lainnya mengenai Pembinaan dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

1. BPS Provinsi Aceh sudah beberapa kali melakukan sosialisasi rekomendasi kegiatan statistik kepada instansi/OPD, salah satunya dilaksanakan pada Pertemuan Pengelolaan Data Kesehatan dengan narasumber dari Koordinator Fungsi Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Aceh. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait alur dan prosedur permintaan rekomendasi kegiatan statistik khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam SDI di wilayah Provinsi Aceh.
2. BPS Provinsi Aceh telah membentuk tim pembinaan dan rekomendasi kegiatan statistik yang anggotanya tidak hanya berasal dari fungsi IPDS, melainkan perwakilan dari masing-masing fungsi/bagian. Tim Pembinaan dan Rekomendasi ini bertanggung jawab dalam pembinaan kegiatan statistik sektoral dan khusus, menyediakan informasi metadata dalam bentuk publikasi tercetak maupun elektronik, melakukan pemutakhiran informasi statistik

sektoral dan khusus secara berkesinambungan, memberikan rekomendasi terhadap kegiatan statistik sektoral dan khusus, memberikan bantuan teknis kepada penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus serta menjadi media untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik.

Rencana Aksi

Peran strategis BPS Provinsi Aceh dalam kegiatan SDI di Provinsi Aceh merupakan potensi tersendiri yang dapat dimanfaatkan ke depannya. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/D/I serta wali data (Diskominfosantik) sehingga diharapkan peran baik BPS maupun perangkat daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia dapat dipahami dan dilaksanakan secara maksimal.
 2. Melakukan pembinaan statistik khususnya statistik sektoral kepada pemerintah daerah.
 3. Kegiatan Pembinaan dan Rekomendasi Kegiatan Statistik pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan bersama Tim Pembinaan dan Rekomendasi Kegiatan Statistik BPS Provinsi Aceh yang telah terbentuk, sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar.**

BPS sebagai Pembina maupun koordinator statistik nasional melakukan penghimpunan metadata kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus. Penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus ini dilakukan BPS dalam rangka penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Penghimpunan metadata ini dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh dengan melakukan kegiatan pendataan metadata statistik

sektoral dan khusus yang ada di Provinsi Aceh secara rutin setiap tahun. Penanggungjawab dari indikator ini adalah Fungsi IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus. Formula penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

Y = Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik

Realisasi indikator kedua dari tujuan dan sasaran strategis kedua tahun 2021 sebesar 35 persen dari target 15 persen. Dengan demikian, capaian indikator sasaran strategis kedua dari tujuan kedua telah tercapai sebesar 120 persen. Realisasi 35 persen berasal dari 14 (empat belas) K/L/D/I yang menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus sesuai standar dari 40 K/L/D/I yang ada di BPS Provinsi Aceh, diantaranya Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perum Bulog, Dinas Pendidikan, PLN, Sekretariat DPRA, Dinas Peternakan, RSJ, BKSDA Aceh, Dinas Kekayaan Aceh, Disnakermobduk.

Kelebihan realisasi indikator “Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar” karena adanya permintaan dari BPS Pusat untuk memenuhi 70 persen metadata dari Dinas yang ada di publikasi Daerah Dalam Angka (DDA). Dengan demikian, target pada indikator ini telah tercapai, yaitu sebesar 120 persen.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa

depan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator kedua dari tujuan dan sasaran kedua ini, di antaranya:

1. Kurangnya pengetahuan OPD yang melaksanakan kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan.
2. Sulitnya mencari instansi yang mau memberikan informasi perihal kegiatan statistik yang telah dilaksanakan di instansi tersebut sehingga dapat dijadikan sampel atau responden perihal metadata yang dilaksanakan.
3. Pada level Kabupaten/Kota masih kurang paham perihal pengumpulan kegiatan metadata.
4. Padatnya kegiatan fungsi IPDS pada Tahun 2021, berupa HSN, RB, keterlibatan dalam tim kreatif dan tim humas.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi terhadap instansi atau OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan instansi atau OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Provinsi Aceh.
2. Melakukan sosialisasi mengenai metadata kegiatan statistik bagi penanggungjawab metadata di BPS Kabupaten/Kota.
3. Meski padatnya kegiatan fungsi IPDS pada Tahun 2021, kegiatan metadata kegiatan statistik tetap dilakukan dengan menugaskan tim untuk melakukan pendataan metadata ke dinas terkait.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:



1. Berkoordinasi di awal tahun dengan wali data yaitu Diskominfoantik Provinsi Aceh beserta K/L/D/I setempat, agar menghimbau kepada K/L/D/I di Provinsi Aceh untuk menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar ke BPS Provinsi Aceh.

Berdasarkan **Tabel 9**, rata-rata capaian indikator sasaran pada tujuan kedua pada tahun 2021 mencapai 110 persen. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan kedua adalah sebesar 110 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan kedua “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN” dengan sasaran strategis “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN” telah tercapai.

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Pada tujuan ini ada satu sasaran strategis yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I”. Fokus utama pada tujuan ketiga ini adalah peran serta BPS memberikan pelayanan prima dalam bentuk pembinaan kepada K/L/D/I terkait di wilayah kerjanya agar mampu menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Pada tujuan dan sasaran strategis ketiga ini ditetapkan 1 (satu) indikator sasaran strategis yaitu “Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai

NSPK”. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Definisi NSPK berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Norma diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel serta menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.
- Standar yaitu memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik; memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku.
- Prosedur yaitu mengikuti cara perolehan data sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki tahapan penyelenggaraan terdiri dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data; menyampaikan rancangan dan meminta rekomendasi ke BPS serta memenuhi seluruh prosedural dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral hingga didiseminasikan.
- Kriteria yaitu untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan, dan konsisten.

Tabel 10.
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Ketiga

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
SS3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I				
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	20,00	260,00	120,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				120,00

Kegiatan statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan statistik sektoral yang sesuai NSPK bertujuan untuk mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah, dan menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas. Penanggung jawab untuk indikator ini di BPS Provinsi Aceh adalah Fungsi IPDS. Formula pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

Y = Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik

Berdasarkan **Tabel 10**, sasaran strategis ketiga yaitu Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I. Indikator dari sasaran strategis tersebut adalah persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. Indikator ini mengukur keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi

bidang kelembagaan dan SDM, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral.

Pada tahun 2021, realisasi dari indikator tujuan ketiga ini adalah sebesar 260 persen dari target 20 persen yang bersumber dari 12 (dua belas) K/L/D/I yang menyampaikan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus sesuai standar ke BPS Provinsi Aceh dan statusnya “*approved*” oleh BPS dan 1 (satu) K/L/D/I yang telah melaksanakan rekomendasi statistik yang telah diberikan oleh BPS dari target 5 (lima) K/L/D/I yang pernah diberikan pembinaan statistik sektoral, diantaranya Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PLN, Sekretariat DPRA, Dinas Peternakan, RSJ, BKSDA Aceh, Dinas Kekayaan Aceh, Disnakermobduk dan DPMPTSP. Dengan demikian, target indikator pertama dari sasaran strategis dan tujuan ketiga telah tercapai 120 persen.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa depan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator pertama dari tujuan dan sasaran ketiga ini, di antaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan pemerintah daerah ataupun instansi setempat terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang sesuai NSPK.
- b. Struktur organisasi walidata di Provinsi Aceh masih belum ada, sehingga sulit berkomunikasi dengan dinas karena tidak ada asistensi sektoral dari walidata.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi atau OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi atau OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BPS. Dengan demikian, diharapkan instansi atau OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Provinsi Aceh.
- b. Koordinasi yang lebih efektif ke penanggungjawab kegiatan statistik di Provinsi Aceh sambil menunggu kejelasan struktur organisasi walidata di Aceh terbentuk.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Melakukan pembinaan ataupun sosialisasi dan pendampingan instansi atau OPD setempat terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang sesuai NPSK.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang sesuai NSPK.
3. Memberikan pelayanan konsultasi statistik kepada pemerintah daerah yang bisa diakses melalui PST baik *online* maupun *offline*.

Berdasarkan **Tabel 10**, rata-rata capaian indikator sasaran pada tujuan ketiga pada tahun 2021 mencapai 120 persen. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan ketiga sebesar 120 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan ketiga “Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN” telah tercapai.

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Tujuan keempat yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”. Tujuan keempat ini berkaitan dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan keempat ini mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu, “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Untuk mencapai sasaran strategis ini, ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis, yaitu “Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat” dan “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS”. Capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat disajikan pada **Tabel 11**.

Tabel 11.
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Keempat

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
SS3. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	71,30	74,18	104,04
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	85,00	98,57	115,96
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				110,00

Berdasarkan **Tabel 11**, tujuan keempat dicapai dengan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator yang terukur yaitu:

1. hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada instansi diharapkan dapat mewujudkan hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Penanggung jawab di BPS Provinsi Aceh untuk indikator ini adalah Bagian Umum dimana nilai SAKIP didapatkan dari Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pelaksanaan evaluasi SAKIP rutin dilakukan setiap tahun.

Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi mempunyai bobot (20).

Pada tahun 2021, persentase hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat ditargetkan sebesar 71,30 poin, target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi pada tahun 2020 dan merupakan keputusan bersama hasil rapat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian dari inspektorat, realisasi indikator sasaran strategis pertama pada tujuan keempat sebesar 74,18 poin, sehingga capaian kinerjanya mencapai 104,04 persen dan dikategorikan **BB**, artinya nilai SAKIP BPS Provinsi Aceh tahun 2021 **sangat baik**, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Capaian nilai SAKIP 2021 sedikit lebih tinggi dari capaian tahun lalu yang hanya sebesar 104,03 persen.

Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat BPS RI, beberapa catatan yang diberikan untuk penilaian per komponen, untuk penilaian komponen **perencanaan kinerja**, masih belum tersedianya dokumentasi tindak lanjut dari hasil monitoring. Untuk penilaian komponen **Pengukuran Kinerja**, SOP pengumpulan data kinerja masih menggunakan SOP yang disusun pada Januari 2019 dan belum terdapat SOP hasil revisi.

SOP pengumpulan data kinerja sudah ditandatangani oleh kepala satker namun belum diberi cap satker. Pada SOP belum terdapat keterangan waktu pengumpulan data kinerja/FRA kepada penanggung jawab. Kemudian, dasar hukum pada SOP pengumpulan data kinerja dan SK Tim SAKIP masing menggunakan peraturan lama, yakni Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Selain itu, CKP pada November-Desember 2020 masih menggunakan nomenklatur lama serta belum terdapat bukti kertas kerja yang digunakan untuk penilaian *reward and punishment* pada tahun 2021. Untuk penilaian komponen **pelaporan kinerja**, Alasan penetapan PK dengan pertimbangan hasil kinerja tahun 2020 tidak ditemukan pada semua indikator. Pada alasan-alasan yang menyertakan tahun 2020, tidak dijabarkan dengan lebih rinci, hanya

diberi keterangan “Menyesuaikan dengan hasil 2020”. Untuk pelaksanaan komponen **Evaluasi Kinerja**, BPS Provinsi Aceh telah melakukan rapat evaluasi Triwulan I yang dilengkapi dengan undangan, daftar hadir dan notula rapat. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada notula, yakni notula level Koordinator Fungsi yang dilampirkan membahas kendala dan solusi secara umum tidak per indikator kinerja dan belum terdapat kesepakatan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti. Hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan BPS Provinsi Aceh juga belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja. Kemudian, dokumen *reward dan punishment* serta kertas kerja penilaian tahun 2021 belum dilampirkan. Pada komponen **capaian kinerja**, bukti dukung yang dilampirkan pada poin penghargaan-penghargaan lainnya tidak relevan karena sudah masuk pada penilaian poin terkait inisiatif dalam pemberantasan korupsi.

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Provinsi Aceh diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Provinsi Aceh dilakukan dengan mengundang seluruh pimpinan beserta tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di BPS Provinsi Aceh. Dokumen yang dihasilkan berupa rencana aksi atau perjanjian kinerja yang memuat target, *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap bulan dan triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa rapat yang

dihadiri oleh seluruh pimpinan dan tim SAKIP. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran. Penyusunan laporan kinerja BPS Provinsi Aceh melibatkan seluruh anggota tim SAKIP. Kerja sama dan komunikasi aktif penanggung jawab SAKIP terus terjalin baik dengan didukung oleh pemanfaatan *Whatsapp Group*. Setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP, dapat dikomunikasikan dan dibahas secara langsung dalam *Whatsapp Group*.

Masalah/kendala yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator pertama dari tujuan dan sasaran keempat ini, di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran pegawai BPS Provinsi Aceh akan pentingnya implementasi SAKIP.
2. Pola pikir pegawai yang keliru bahwa SAKIP hanya tanggung jawab Fungsi Perencanaan atau Bagian Umum.
3. Pelaksanaan rapat bulanan sebagai evaluasi rutin dari masing-masing fungsi dan bagian telah dilaksanakan, tetapi notula yang disiapkan tidak memuat secara rinci penjelasan per indikator.
4. Penetapan beberapa konsep definisi dan penetapan sumber data untuk pengelolaan SAKIP masih ada yang belum jelas dan standar.
5. Hasil penilaian SAKIP inspektorat belum sepenuhnya dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya;
6. Banyaknya dokumentasi kegiatan SAKIP mulai dari perencanaan, evaluasi dan laporan belum rapi dan terorganisir.

7. *Template* Form Rencana Aksi (FRA) Tahun 2021 yang disediakan BPS Pusat untuk monitoring capaian kinerja hanya sampai triwulan, sehingga sulit bagi Fungsi Perencanaan untuk memonitoring capaian kinerja per bulan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

1. Upaya perubahan pola pikir di BPS Provinsi Aceh bahwa SAKIP bukan hanya tanggung jawab Fungsi Perencanaan atau Bagian Umum, melainkan tanggung jawab seluruh pegawai BPS Provinsi Aceh, sehingga implementasi SAKIP dilakukan untuk seluruh pegawai BPS Provinsi Aceh.
2. Membuat aplikasi *e-sakip* sebagai sarana untuk monitoring proses pelaksanaan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja hingga capaian kinerja serta memudahkan pengunjung *website* dalam memahami SAKIP.
3. Pada pelaksanaan evaluasi triwulanan, setiap fungsi dan bagian wajib memaparkan progres capaian kinerja serta menjelaskan kendala, solusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan kedepannya.
4. Menyediakan *template* notula rapat bulanan dan *template* paparan untuk memudahkan perwakilan tim SAKIP di masing-masing fungsi dan bagian dalam mendokumentasikan kegiatan evaluasi dan memudahkan untuk menyiapkan bahan tayang evaluasi.
5. Melakukan pergantian tim SAKIP yang solid tiap tahun yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPS Provinsi Aceh, yang beranggotakan Kepala BPS Provinsi Aceh, Koordinator Fungsi, Sub Koordinator Fungsi dan perwakilan staf pada masing-masing fungsi.

6. Menjalankan SOP (*Standard Operating System*) yang telah dibuat.
7. Berusaha mengikuti format/*template* dokumen SAKIP terbaru dalam pemenuhan dokumen *self assessment* penilaian SAKIP.
8. Menyediakan bahan tayang evaluasi yang menarik dan informatif untuk memudahkan pegawai dan peserta evaluasi dalam memahami paparan.
9. Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan SAKIP yang diikuti Kepala BPS Provinsi Aceh, Koordinator Fungsi, Sub Koordinator Fungsi dan perwakilan staf pada masing-masing fungsi. Selain itu, Tim SAKIP juga telah mengikuti *workshop* pembinaan SAKIP yang diadakan oleh BPS Pusat.
10. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BPS RI untuk memahami Indikator Kinerja Utama yang baru pada Renstra tahun 2020-2024.
11. Mengembangkan *template* FRA yang disediakan BPS Pusat hingga per bulan.
12. Menerjemahkan atau mendiskusikan lebih lanjut hasil evaluasi SAKIP inspektorat untuk dicarikan tindak lanjutnya.
13. Mengoptimalkan kinerja Tim SAKIP dalam mendokumentasikan kegiatan SAKIP.
14. Melakukan review dokumen perencanaan secara berkala sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen tersebut berjalan selaras.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Memperbarui tim SAKIP yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPS Provinsi Aceh, yang beranggotakan Kepala BPS Provinsi Aceh, Koordinator Fungsi, Sub Koordinator Fungsi dan

perwakilan staf pada masing-masing fungsi.

2. Memperbarui SOP dengan kondisi terkini.
3. Meningkatkan keterlibatan langsung pimpinan dalam implementasi SAKIP.
4. Meningkatkan kedisiplinan dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen pendukung SAKIP.

2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Indikator ini bermanfaat untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan konsumen yang menjadi responden Survei Kebutuhan Data (SKD) terhadap pemenuhan sarana dan prasarana di unit PST BPS Provinsi Aceh dalam rangka peningkatan pelayanan data dan informasi statistik yang disediakan oleh BPS Provinsi Aceh. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Kepuasan pengguna layanan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS dapat diperoleh dari atribut kenyamanan sarana dan prasarana serta kejelasan fasilitas pengaduan. Sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus, serta aplikasi pelayanan *online* bagi responden online. Identifikasi sarana dan prasarana di unit PST BPS Provinsi Aceh, meliputi informasi pelayanan, maklumat pelayanan, wifi, petugas pelayanan, ruang pelayanan, computer dan sarana pengaduan. Semua komponen sarana dan prasarana tersebut dapat dipenuhi oleh PST di BPS Provinsi Aceh, yang mengindikasikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik dalam pelayanan. Selain tersedianya sarana prasarana tersebut PST BPS Provinsi Aceh melakukan adaptasi dengan kondisi baru, dengan melakukan pengembangan untuk pelayanan yang dilakukan secara online.

Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi serta sarana pendukung, pelayanan tanpa tatap muka langsung terus dikembangkan di PST. Pengukuran indikator ini diperoleh dari Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS Provinsi Aceh. Penanggung jawab dari indikator ini di BPS Provinsi Aceh adalah Bagian Umum.

Formula penghitungannya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Y = Jumlah penggunaan data BPS

Berdasarkan **Tabel 11**, indikator persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS tahun 2021 ditargetkan sebesar 85 persen, target tersebut didasarkan pada realisasi pada tahun 2020. Realisasi pada indikator sasaran strategis kedua dari tujuan keempat ini sebesar 98,57 persen, sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 mencapai 115,96 persen. Capaian ini akan menjadi tantangan bagi BPS Provinsi Aceh ke depannya untuk terus memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Masalah/kendala yang dihadapi

Di tahun 2021, munculnya pandemi Covid-19 memberikan hambatan dari sisi pelayanan kepada pengguna data dikarenakan proses bisnis pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui tatap muka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh di tahun 2021 khususnya untuk senantiasa melakukan perubahan serta penyesuaian pelayanan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Memperluas pelayanan data secara *online* dengan *launching* fitur *live chat* data pelayanan statistik terpadu. Fitur *live chat* ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk melakukan konsultasi dan permintaan data yang langsung akan direspon oleh petugas pelayanan statistik terpadu.
- b. Meningkatkan pelayanan data secara *online*, seperti *whatsapp*, *email*, telepon dan *live chat website* serta meningkatkan respon dengan kualitas yang baik pada media *online* tersebut.
- c. Membuat poster ataupun infografis terkait prosedur pengaduan di PST serta mengumumkannya di *website* dan media sosial lainnya.
- d. Pada era *New Normal*, BPS Provinsi Aceh Kembali membuka PST dengan menyesuaikan protokol Kesehatan dan perubahan jam layanan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung pada pelayanan tatap muka.
- e. BPS Provinsi Aceh juga membentuk tim pelayanan, diseminasi, dan pengelolaan *website*, agar memudahkan koordinasi terhadap *subject matter* dan meningkatkan pelayanan statistik lebih berkualitas.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Membuat data BPS agar lebih mudah diakses dan dicari khususnya melalui *website*. Senantiasa memperbaharui tabel statistik pada *website* dengan data-data terbaru, mengemas data statistik menjadi lebih menarik dengan memperbanyak infografis dan disebarkan melalui *website* ataupun sosial media resmi BPS Provinsi Aceh, rutin mengunggah Berita Resmi Statistik (BRS)

melalui website, dan juga mensosialisasikan data BPS secara intensif khususnya kepada K/L/D/I yang ada di BPS Provinsi Aceh. Dengan beberapa strategi tersebut, diharapkan pengguna data khususnya yang berasal dari K/L/D/I mengetahui ketersediaan data yang ada di BPS dan dapat dijadikan referensi dalam perencanaan pembangunan.

2. Menyediakan penjelasan yang lengkap kepada pengunjung PST agar mengetahui sarana prasarana baik secara fisik di BPS Provinsi Aceh maupun online di media sosial/website.
3. Meningkatkan cakupan responden SKD yang berasal dari dinas/instansi agar lebih mengetahui manfaat dari diperolehnya data BPS.

Berdasarkan **Tabel 11**, rata-rata capaian indikator sasaran pada tujuan keempat pada tahun 2021 mencapai 110 persen. Dengan demikian, capaian kinerja tujuan keempat sebesar 110 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis pada tujuan keempat “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi” dengan sasaran strategis “SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan” telah tercapai. Banyak hal yang masih perlu dibenahi untuk mencapai target berikutnya, antara lain mempelajari dan memperdalam Indikator Kinerja Utama yang baru pada Renstra Tahun 2020-2024, mengatur strategi pemenuhan target SAKIP agar target tercapai, meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan, Inspektorat, dan BPS Provinsi Lainnya, serta menyediakan penjelasan yang lengkap kepada pengunjung PST agar mengetahui sarana prasarana baik secara fisik di BPS Provinsi Aceh maupun *online* di media sosial (*website*).

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh

3.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan BPS Provinsi Aceh

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021 terhadap realisasi Kinerja Tahun sebelumnya pada dasarnya tidak dapat di bandingkan “*Apple to Apple*” karena memiliki IKU yang berbeda sehingga tujuan dan sasaran strategis dan indikator yang ingin dicapai juga berbeda. Namun dapat dianalisa keterbandingan pencapaian hasil akhir kinerjanya berdasarkan **Tabel 12.**

Tabel. 12.
Perkembangan Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	Tingkat Capaian (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan (%)	90,74	108,03	106,80	81,33	111,43
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis (%)	88,32	106,67	98,53	81,33	111,43

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terlihat cukup fluktuatif. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode 2017-2021 mayoritas di atas 100 persen, kecuali tahun 2017 dan tahun 2020 masing-masing rata-rata capaian sebesar 90,74 persen dan 81,33 persen. Capaian ini menunjukkan BPS Provinsi Aceh selalu berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun. Perkembangan capaian hasil akhir kinerja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dirinci pada **Tabel 12.**

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja tahun 2019 sebagai penghujung tahun untuk rentang waktu Renstra 2015 – 2019 sudah tergolong sangat baik dilihat dari pencapaian dari tiap-tiap indikator yang ada sebagaimana dijabarkan di tabel di atas. Sekalipun ada beberapa indikator yang tidak mencapai nilai sesuai target sebagai dampak dari kondisi dan permasalahan yang ditemui di lapangan,

namun dengan berbagai upaya maka permasalahan tersebut dapat diatasi, dan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh untuk tahun 2021 merupakan capaian tertinggi selama periode Tahun 2017-2021, yakni mencapai 111,43 persen.

Perkembangan capaian kinerja sasaran strategis periode 2017-2021. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis selama periode tersebut sejalan dengan capaian kinerja tujuan, yakni tampak fluktuatif. Pada tahun 2017 rata-rata sasaran strategis mengalami kenaikan dari 88,32 persen menjadi 106,67 persen di tahun 2018, kemudian mengalami penurunan hingga 81,33 persen pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 111,43 persen pada tahun 2021. Capaian ini diharapkan BPS Provinsi Aceh memiliki strategi yang dapat selalu diupayakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan di setiap awal tahun. Masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, diperbaiki, dan dilengkapi dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama dirinci pada **Tabel 13**.

Secara garis besar, capaian kinerja BPS Provinsi Aceh pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 111,43 persen, meningkat signifikan dari capaian kinerja tahun 2020 yang hanya sebesar 81,33 persen. Capaian pada sasaran strategis dan indikator sasaran strategis juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel. 13.
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020 dengan 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				110,00			110,00
SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas				110,00			110,00
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		50,00	80,00	120,00	80,00	100,00	120,00
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		2,94	2,94	100,00	1,79	1,79	100,00
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				120,00			110,00
SS2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN				120,00			110,00
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik		-	-	-	100,00	100,00	100,00
Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar		10,00	15,00	120,00	15,00	35,00	120,00
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				0,00			120,00
SS3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I				0,00			120,00
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK		2,00	-	0,00	20,00	260,00	120,00
T4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				95,34			110,00
SS4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan				95,34			110,00
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		71,00	73,86	104,03	71,30	74,18	104,04
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS		98,00	84,93	86,66	85,00	98,57	115,96
Rata-rata capaian kinerja				81,33			111,43

Pada tujuan pertama yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis pada tujuan pertama tahun 2021 memiliki capaian kinerja sebesar 110 persen, sama halnya dengan tahun 2020 telah mencapai target dengan capaian sebesar 110 persen.

Untuk indikator sasaran strategis pertama yaitu Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional berdasarkan hasil SKD realiasi tahun 2020 sebesar 80 persen meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2021. Hal ini menandakan semakin baiknya hasil data yang BPS gunakan sehingga para pengguna data percaya dan selalu menggunakan data BPS dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Untuk indikator sasaran strategis selanjutnya yaitu persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional pada tahun 2020 sebesar 2,94 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,79. Jenis publikasi yang dihasilkan yang menerapkan standar akurasi antara tahun 2020 dan 2021 sama yaitu Publikasi Kesejahteraan Rakyat, yang membedakan adalah jumlah publikasi yang dihasilkan BPS secara keseluruhan yang menjadi pembagi, dimana terjadi penambahan publikasi yang dihasilkan dari 34 publikasi menjadi 56 publikasi.

Pada tujuan kedua yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis pada tujuan kedua tahun 2021 memiliki capaian kinerja sebesar 110 persen, berbeda dengan capaian tahun 2020 mencapai 120 persen. Hal ini karena Indikator K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik pada tahun 2020 tidak membuat target karena pada tahun 2020 BPS Provinsi Aceh berfokus memberikan pengetahuan tentang kegiatan statistik sehingga tujuan pada tahun 2020 adalah memberikan rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/DI. Sedangkan, tindak lanjut dari

rekomendasi tersebut baru ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2021 dan sudah terealisasi.

Untuk Indikator persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar yang di nilai dari K/L/D/I yang menyampaikan metadata terjadi kenaikan dimana jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata pada tahun 2020 sebesar 6 K/L/D/I meningkat menjadi 14 K/L/D/I dari target 40. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran para K/L/D/I dalam memajukan perstatistikan dengan melengkapi metadata

Pada tujuan ketiga yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis pada tujuan ketiga tahun 2021 memiliki capaian sebesar 120 persen, berbeda dengan tahun 2020 dimana target indikator persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK adalah sebanyak 2,00 persen, tetapi target tersebut tidak terealisasi sama sekali, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini 0,00 persen. Pada tahun 2021 besarnya realisasi yang dicapai dari jumlah K/L/D/I yang telah menindaklanjuti rekomendasi statistik BPS adanya *approval* atau persetujuan terhadap metadata yang telah dikeluarkan oleh K/L/D/I.

Pada tujuan keempat yang merupakan rata-rata indikator sasaran strategis pada tujuan keempat tahun 2021 mencapai 110 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,34 persen. Peningkatan capaian ini tentunya karena kerjasama seluruh tim SAKIP, subject matter dan seluruh pegawai BPS Provinsi Aceh.

Hasil penilaian SAKIP tahun 2020 - 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 14.
Hasil Implementasi SAKIP BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021

No	Komponen	Bobot	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,19	23,89
2	Pengukuran Kinerja	25	19,06	19,38
3	Pelaporan Kinerja	15	11,89	12,25
4	Evaluasi Kinerja	10	07,06	06,16
5	Capaian Kinerja	29	11,67	12,50
Total		100	73,87	74,18

Terjadi peningkatan untuk komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja, tetapi terjadi penurunan untuk komponen perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja. Selain itu, banyak kekurangan pada tahun sebelumnya yang telah dilakukan pembenahan tetapi masih butuh banyak perbaikan dan kelengkapan dimana tetap di butuhkan komitmen bersama dari setiap anggota Tim.

Sedangkan untuk indikator terakhir yaitu Kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS berdasarkan hasil SKD realisasai pada tahun 2020 sebesar 84, 93 meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,57. Walaupun di masa pandemi pelayanan terhadap pengguna data tidak terganggu.

3.3. Capaian Kinerja 2021 terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

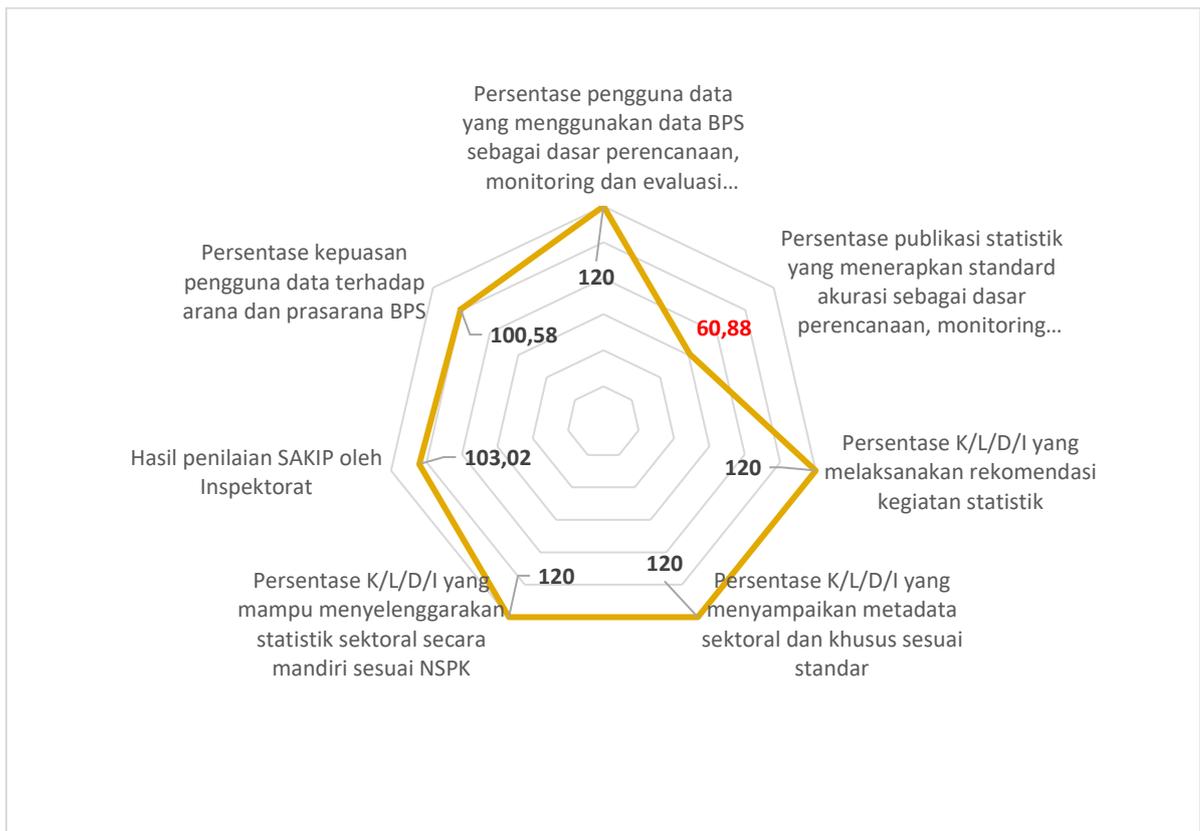
Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh terhadap target Renstra 2024 dihitung berdasarkan realisasi yang dicapai 2021 terhadap target BPS Provinsi Aceh pada Renstra 2024. Capaian kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021 terhadap target Renstra 2024 dapat dilihat pada **Tabel 15**.

Tabel. 15.
Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2021 terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2024	2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			110,00		90,44	
SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas			110,00		90,44	
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		60,00	80,00	120,00	100,00	120,00
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		2,94	2,94	100,00	1,79	60,88
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			120,00		120,00	
SS2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN			120,00		120,00	
Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik		30,00	-	-	100,00	120,00
Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar		10,00	12,00	120,00	42,50	120,00
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			0,00		120,00	
SS3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I			0,00		120,00	
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK		2,00	0,00	0,00	40,00	120,00
T4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			94,62		101,80	
SS4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan			94,62		101,80	
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		72,00	73,86	102,58	74,18	103,02
Persentase kepuasan pengguna data terhadap arana dan prasarana BPS		98,00	84,93	86,66	98,57	100,58
Rata-rata capaian kinerja terhadap target Renstra 2024			66,15		106,35	
Rata-rata capaian kinerja terhadap target 2020 dan 2021			81,33		111,43	

Berdasarkan **Tabel 15**, rata-rata capaian kinerja 2021 terhadap target Renstra 2024 sebesar 106,35 persen, meningkat signifikan dari rata-rata capaian tahun 2020 yang hanya mencapai sebesar 66,15 persen. Dari 4 (empat) tujuan tahun 2021, target tujuan kedua, ketiga dan keempat telah mencapai target Renstra 2024 dengan capaian masing-masing sebesar 120 persen, 120 persen dan 101,80 persen, sedangkan tujuan pertama masih belum mencapai target Renstra 2021 dengan capaian masih di bawah 100 persen. Untuk capaian kinerja indikator sasaran strategis BPS Provinsi Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Target Akhir Renstra 2020-2024 belum seluruhnya dapat dicapai pada tahun 2021. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 dibandingkan target Akhir Renstra 2020-2024 sudah semua target dapat direalisasikan kecuali capaian indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional, hanya memiliki capaian sebesar 60,88 persen. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan target antara target pada Renstra 2021 dengan PK 2021, masing-masing target sebesar 2,94 persen dan 1,79 persen. Sementara itu, capaian indikator lainnya mencapai lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan kesungguhan BPS Provinsi Aceh menjalankan berbagai strategi dalam upaya pencapaian target kinerja.



Gambar 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Resntra 2020-2024

Berikut penjelasan terkait capaian kinerja indikator sasaran strategis tahun 2021 terhadap target akhir Renstra 2020-2024.

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 60 persen. Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 100 persen pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar 80,00 persen. Realisasi tersebut sudah melebihi target akhir renstra dengan ukuran capaian kinerja sebesar 120 persen terhadap target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup

tinggi dalam mencapai target yang telah ditentukan, sehingga perlu dilakukan reviu Renstra untuk mendapatkan target yang lebih optimis hingga tahun 2024.

Masalah/kendala yang dihadapi

Di tahun 2021, munculnya pandemi Covid-19 memberikan hambatan dari sisi pelayanan kepada pengguna data dikarenakan proses bisnis pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui tatap muka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh di tahun 2021 khususnya untuk mencapai target indikator sasaran strategis pertama dari tujuan pertama.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Beberapa hal yang telah diupayakan untuk mencapai target antara lain:

- a. Memperluas pelayanan data secara online dengan launching fitur live chat data pelayanan statistik terpadu. Fitur live chat ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk melakukan konsultasi dan permintaan data yang langsung akan direspon oleh petugas pelayanan statistik terpadu.
- b. Meningkatkan pelayanan data secara online, seperti whatsapp, email, telepon dan live chat website serta meningkatkan respon dengan kualitas yang baik pada media online tersebut.
- c. Pada era New Normal, BPS Provinsi Aceh Kembali membuka PST dengan menyesuaikan protokol Kesehatan dan perubahan jam layanan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung pada pelayanan tatap muka.
- d. BPS Provinsi Aceh juga membentuk tim pelayanan, diseminasi, dan pengelolaan website, agar memudahkan koordinasi terhadap subject matter dan meningkatkan pelayanan statistik lebih berkualitas.

Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat data BPS agar lebih mudah diakses dan dicari khususnya melalui website. Senantiasa memperbaharui tabel statistik pada website dengan data-data terbaru, mengemas data statistik menjadi lebih menarik dengan memperbanyak infografis dan disebarakan melalui website ataupun sosial media resmi BPS Provinsi Aceh, rutin mengunggah Berita Resmi Statistik (BRS) melalui website, dan juga mensosialisasikan data BPS secara intensif khususnya kepada K/L/D/I yang ada di BPS Provinsi Aceh. Dengan beberapa strategi tersebut, diharapkan pengguna data khususnya yang berasal dari K/L/D/I mengetahui ketersediaan data yang ada di BPS dan dapat dijadikan referensi dalam perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan cakupan responden SKD yang berasal dari dinas/instansi agar lebih mengetahui manfaat dari diperolehnya data BPS.

2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 2,94 persen. Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 1,79 persen publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional, menurun dari tahun 2020 yaitu sebesar 2,94 persen. Realisasi tersebut masih cukup jauh dari target akhir renstra dengan ukuran capaian kinerja sebesar 60,88 persen terhadap target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Provinsi

Aceh perlu untuk semakin meningkatkan upaya pencapaian pada indikator ini seperti tahun berikutnya, agar target yang sudah ditentukan bisa tercapai atau bahkan terlampaui.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa depan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator kedua dari tujuan dan sasaran pertama, di antaranya:

- a. Salah satu ukuran akurasi data adalah *Relative Standard Error* (RSE). Survei yang dilaksanakan dengan *Simple Random Sampling* (SRS) dapat dihitung dengan mudah. Akan tetapi, survei-survei di BPS tidak pernah menggunakan SRS, melainkan menggunakan rancangan *multi-stage cluster sampling* sebagai pengganti SRS. *Multi-stage cluster sampling* merupakan pilihan terbaik dalam berbagai situasi lapangan. Hal ini mengakibatkan perhitungan *standard error* dan RSE berdasarkan rancangan ini sulit dilakukan. Selain itu, tidak seluruh metodologi survei yang dilakukan di BPS terinformasikan dengan baik sampai ke daerah;
- b. Meskipun Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat pernah mengikuti pelatihan perhitungan RSE, tidak membuat perhitungan RSE menjadi mudah dilakukan, masih terdapat kendala pada perhitungan RSE untuk publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat karena variabel yg ada dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sangat banyak, sedangkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat baru satu kali mengadakan pelatihan penghitungan RSE dan hanya mencoba satu variabel. Padahal, SUSENAS bisa menyediakan ratusan variabel.

Awalnya, tahun 2021 Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat ingin melakukan perjalanan dinas ke pusat untuk berkonsultasi dan belajar penghitungan RSE, tetapi karena pandemi Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke pusat.

- c. Waktu penyusunan publikasi yang sangat terbatas, hal ini disebabkan pengolahan data (proses *editing* dan validasi) yang Panjang membuat ketersediaan data publikasi menjadi lebih lama dan berakibat mendekati jadwal ARC, bahkan hingga publikasi telah terbit, terdapat koreksi *raw data* oleh BPS RI, sehingga perlu Menyusun tabel erata untuk perbaikan publikasi.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Meski sulit, BPS Provinsi Aceh tetap berupaya membuat publikasi yang memuat ukuran kualitas suatu data (RSE). Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Mengupayakan untuk belajar mandiri dan berkonsultasi *online* dengan BPS RI terkait perhitungan RSE.
- b. Sebelum Menyusun RSE, terlebih dahulu Menyusun layout publikasi sebagai dasar penyusunan publikasi, sehingga penyusunan publikasi dapat lebih cepat.
- c. Melakukan kaji ulang jadwal ARC publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh dengan harapan terdapat waktu yang cukup dalam melakukan penyusunan publikasi, sehingga dapat diatur pada akhir tahun.

Rencana Aksi

- a. Berkoordinasi dengan *subject matter* di BPS RI terkait ketersediaan data RSE agar dapat dimunculkan dalam banyak publikasi statistik di BPS.
- b. Meningkatkan kualitas publikasi dengan memperbanyak infografis, mempertajam analisis serta membuat layout yang

semakin menarik. Hal ini merupakan salah satu komitmen BPS Provinsi Aceh untuk meningkatkan keragaman dan kualitas data serta informasi yang disajikan dalam publikasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

- c. Fungsi Statistik Kesejahteraan Rakyat merencanakan untuk mengadakan *sharing knowledge* perihal perhitungan RSE, harapan ke depannya agar lebih banyak lagi publikasi yang memuat standar akurasi data.

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 30 persen. Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 100 persen K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik, dengan tahun 2020 yaitu indikator ini tidak memiliki target, sehingga tidak ada realisasi. Hal ini menunjukkan upaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 telah maksimal, sehingga perlu dilakukan revaluasi Renstra untuk mendapatkan target yang lebih optimis hingga tahun 2024.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih terdapat kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa depan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator pertama dari tujuan dan sasaran kedua, di antaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan OPD yang melaksanakan kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan.
- b. Sebagian besar kegiatan dinas masih berupa kompilasi

administrasi sehingga tidak wajib meminta rekomendasi ke BPS.

- c. Kurangnya sumber daya di fungsi IPDS serta kurangnya pemahaman pegawai lainnya mengenai Pembinaan dan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. BPS Provinsi Aceh sudah beberapa kali melakukan sosialisasi rekomendasi kegiatan statistik kepada instansi/OPD, salah satunya dilaksanakan pada Pertemuan Pengelolaan Data Kesehatan dengan narasumber dari Koordinator Fungsi Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Aceh. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait alur dan prosedur permintaan rekomendasi kegiatan statistik khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam SDI di wilayah Provinsi Aceh.
- b. BPS Provinsi Aceh telah membentuk tim pembinaan dan rekomendasi kegiatan statistik yang anggotanya tidak hanya berasal dari fungsi IPDS, melainkan perwakilan dari masing-masing fungsi/bagian. Tim Pembinaan dan Rekomendasi ini bertanggung jawab dalam pembinaan kegiatan statistik sektoral dan khusus, menyediakan informasi metadata dalam bentuk publikasi tercetak maupun elektronik, melakukan pemutakhiran informasi statistik sektoral dan khusus secara berkesinambungan, memberikan rekomendasi terhadap kegiatan statistik sektoral dan khusus, memberikan bantuan teknis kepada penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus serta menjadi media untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik.

Rencana Aksi

Peran strategis BPS Provinsi Aceh dalam kegiatan SDI di Provinsi Aceh merupakan potensi tersendiri yang dapat dimanfaatkan ke depannya. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan K/L/D/I serta wali data (Diskominfosantik) sehingga diharapkan peran baik BPS maupun perangkat daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia dapat dipahami dan dilaksanakan secara maksimal.
- b. Melakukan pembinaan statistik khususnya statistik sektoral kepada pemerintah daerah.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Rekomendasi Kegiatan Statistik pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan bersama Tim Pembinaan dan Rekomendasi Kegiatan Statistik BPS Provinsi Aceh yang telah terbentuk, sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

2. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar.

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 10 persen. Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 42,50 persen penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar, meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar 12 persen. Realisasi tersebut sudah sesuai dengan target akhir renstra dengan ukuran capaian kinerja sebesar 120 persen terhadap target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan upaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 telah maksimal, sehingga perlu dilakukan revaluasi Renstra untuk mendapatkan target yang lebih optimis hingga tahun 2024.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk

dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa depan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator kedua dari tujuan dan sasaran kedua ini, di antaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan OPD yang melaksanakan kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan.
- b. Sulitnya mencari instansi yang mau memberikan informasi perihal kegiatan statistik yang telah dilaksanakan di instansi tersebut sehingga dapat dijadikan sampel atau responden perihal metadata yang dilaksanakan.
- c. Pada level Kabupaten/Kota masih kurang paham perihal pengumpulan kegiatan metadata.
- d. Padatnya kegiatan fungsi IPDS pada Tahun 2021, berupa HSN, RB, keterlibatan dalam tim kreatif dan tim humas.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Memberikan sosialisasi terhadap instansi atau OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan instansi atau OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Provinsi Aceh.
- b. Melakukan sosialisasi mengenai metadata kegiatan statistik bagi penanggungjawab metadata di BPS Kabupaten/Kota.
- c. Meski padatnya kegiatan fungsi IPDS pada Tahun 2021, kegiatan metadata kegiatan statistik tetap dilakukan dengan menugaskan tim untuk melakukan pendataan metadata ke dinas terkait.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

- a. Berkoordinasi di awal tahun dengan wali data yaitu Diskominfoantik Provinsi Aceh beserta K/L/D/I setempat, agar menghimbau kepada K/L/D/I di Provinsi Aceh untuk menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar ke BPS Provinsi Aceh.

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 2 persen. Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 40 persen K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, berbeda dari tahun 2020 yaitu tidak memiliki realisasi. Realisasi tersebut sudah sesuai dengan target akhir renstra dengan ukuran capaian kinerja sebesar 120 persen terhadap target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan upaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 telah maksimal, sehingga perlu dilakukan revaluasi Renstra untuk mendapatkan target yang lebih optimis hingga tahun 2024.

Masalah/kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan atau mempertahankan capaiannya di masa depan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator pertama dari tujuan dan sasaran ketiga ini, di antaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan pemerintah daerah ataupun instansi setempat terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang sesuai NSPK.
- b. Struktur organisasi walidata di Provinsi Aceh masih belum ada,

sehingga sulit berkomunikasi dengan dinas karena tidak ada asistensi sektoral dari walidata.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi atau OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi atau OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BPS. Dengan demikian, diharapkan instansi atau OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Provinsi Aceh.
- b. Koordinasi yang lebih efektif ke penanggungjawab kegiatan statistik di Provinsi Aceh sambil menunggu kejelasan struktur organisasi walidata di Aceh terbentuk.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

- a. Melakukan pembinaan ataupun sosialisasi dan pendampingan instansi atau OPD setempat terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang sesuai NPSK.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang sesuai NSPK.
- c. Memberikan pelayanan konsultasi statistik kepada pemerintah daerah yang bisa diakses melalui PST baik online maupun offline.

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 82,07 persen.

Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 74,18 poin hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, meningkat dari tahun 2020 yaitu

sebesar 73,86 persen. Realisasi tersebut sedikit melebihi target akhir renstra dengan ukuran capaian kinerja sebesar 103,02 persen terhadap target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan hingga tahun 2024 ke depan untuk semakin meningkatkan upaya pencapaian pada indikator ini seperti tahun 2021, agar target yang sudah ditentukan bisa tercapai atau bahkan terlampaui.

Masalah/kendala yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi oleh BPS Provinsi Aceh terkait indikator pertama dari tujuan dan sasaran keempat ini, di antaranya:

- a. Kurangnya kesadaran pegawai BPS Provinsi Aceh akan pentingnya implementasi SAKIP.
- b. Pola pikir pegawai yang keliru bahwa SAKIP hanya tanggung jawab Fungsi Perencanaan atau Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan rapat bulanan sebagai evaluasi rutin dari masing-masing fungsi dan bagian telah dilaksanakan, tetapi notula yang disiapkan tidak memuat secara rinci penjelasan per indikator.
- d. Penetapan beberapa konsep definisi dan penetapan sumber data untuk pengelolaan SAKIP masih ada yang belum jelas dan standar.
- e. Hasil penilaian SAKIP inspektorat belum sepenuhnya dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya;
- f. Banyaknya dokumentasi kegiatan SAKIP mulai dari perencanaan, evaluasi dan laporan belum rapi dan terorganisir.
- g. *Template* Form Rencana Aksi (FRA) Tahun 2021 yang disediakan BPS Pusat untuk monitoring capaian kinerja hanya sampai triwulan, sehingga sulit bagi Fungsi Perencanaan untuk memonitoring capaian kinerja per bulan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Upaya perubahan pola pikir di BPS Provinsi Aceh bahwa SAKIP bukan hanya tanggung jawab Fungsi Perencanaan atau Bagian Umum, melainkan tanggung jawab seluruh pegawai BPS Provinsi Aceh, sehingga implementasi SAKIP dilakukan untuk seluruh pegawai BPS Provinsi Aceh.
- b. Membuat aplikasi e-sakip sebagai sarana untuk monitoring proses pelaksanaan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja hingga capaian kinerja serta memudahkan pengunjung website dalam memahami SAKIP.
- c. Pada pelaksanaan evaluasi triwulanan, setiap fungsi dan bagian wajib memaparkan progres capaian kinerja serta menjelaskan kendala, solusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan kedepannya.
- d. Menyediakan template notula rapat bulanan dan template paparan untuk memudahkan perwakilan tim SAKIP di masing-masing fungsi dan bagian dalam mendokumentasikan kegiatan evaluasi dan memudahkan untuk menyiapkan bahan tayang evaluasi.
- e. Melakukan pergantian tim SAKIP yang solid tiap tahun yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPS Provinsi Aceh, yang beranggotakan Kepala BPS Provinsi Aceh, Koordinator Fungsi, Sub Koordinator Fungsi dan perwakilan staf pada masing-masing fungsi.
- f. Menjalankan SOP (Standard Operating System) yang telah dibuat.
- g. Berusaha mengikuti format/template dokumen SAKIP terbaru dalam pemenuhan dokumen self assessment penilaian SAKIP.
- h. Menyediakan bahan tayang evaluasi yang menarik dan

informatif untuk memudahkan pegawai dan peserta evaluasi dalam memahami paparan.

- i. Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan SAKIP yang diikuti Kepala BPS Provinsi Aceh, Koordinator Fungsi, Sub Koordinator Fungsi dan perwakilan staf pada masing-masing fungsi. Selain itu, Tim SAKIP juga telah mengikuti workshop pembinaan SAKIP yang diadakan oleh BPS Pusat.
- j. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BPS RI untuk memahami Indikator Kinerja Utama yang baru pada Renstra tahun 2020-2024.
- k. Mengembangkan template FRA yang disediakan BPS Pusat hingga per bulan.
- l. Menerjemahkan atau mendiskusikan lebih lanjut hasil evaluasi SAKIP inspektorat untuk dicarikan tindak lanjutnya.
- m. Mengoptimalkan kinerja Tim SAKIP dalam mendokumentasikan kegiatan SAKIP.
- n. Melakukan review dokumen perencanaan secara berkala sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen tersebut berjalan selaras.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

- a. Memperbarui tim SAKIP yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPS Provinsi Aceh, yang beranggotakan Kepala BPS Provinsi Aceh, Koordinator Fungsi, Sub Koordinator Fungsi dan perwakilan staf pada masing-masing fungsi.
- b. Memperbarui SOP dengan kondisi terkini.
- c. Meningkatkan keterlibatan langsung pimpinan dalam implementasi SAKIP.

- d. Meningkatkan kedisiplinan dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen pendukung SAKIP.

2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Indikator ini memiliki target akhir Renstra sebesar 98 persen. Berdasarkan **Tabel 14**, pada tahun 2021 terdapat 98,57 persen kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar 86,66 persen. Realisasi tersebut sedikit melebihi target akhir renstra dengan ukuran capaian kinerja sebesar 100,58 persen terhadap target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan hingga tahun 2024 ke depan untuk semakin meningkatkan upaya pencapaian pada indikator ini seperti tahun 2021, agar target yang sudah ditentukan bisa tercapai atau bahkan terlampaui.

Masalah/kendala yang dihadapi

Di tahun 2021, munculnya pandemi Covid-19 memberikan hambatan dari sisi pelayanan kepada pengguna data dikarenakan proses bisnis pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui tatap muka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Aceh di tahun 2021 khususnya untuk senantiasa melakukan perubahan serta penyesuaian pelayanan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

Adapun upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Aceh dalam pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Memperluas pelayanan data secara *online* dengan *launching* fitur *live chat* data pelayanan statistik terpadu. Fitur *live chat* ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk melakukan konsultasi dan permintaan data yang langsung akan direspon oleh petugas pelayanan statistik terpadu.

- b. Meningkatkan pelayanan data secara online, seperti whatsapp, email, telepon dan live chat website serta meningkatkan respon dengan kualitas yang baik pada media online tersebut.
- c. Membuat poster ataupun infografis terkait prosedur pengaduan di PST serta mengumumkannya di website dan media sosial lainnya.
- d. Pada era New Normal, BPS Provinsi Aceh Kembali membuka PST dengan menyesuaikan protokol Kesehatan dan perubahan jam layanan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung pada pelayanan tatap muka.
- e. BPS Provinsi Aceh juga membentuk tim pelayanan, diseminasi, dan pengelolaan website, agar memudahkan koordinasi terhadap subject matter dan meningkatkan pelayanan statistik lebih berkualitas.

Rencana Aksi

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan agar target dapat tercapai lagi untuk tahun berikutnya, antara lain:

- a. Membuat data BPS agar lebih mudah diakses dan dicari khususnya melalui *website*. Senantiasa memperbaharui tabel statistik pada *website* dengan data-data terbaru, mengemas data statistik menjadi lebih menarik dengan memperbanyak infografis dan disebarakan melalui website ataupun sosial media resmi BPS Provinsi Aceh, rutin mengunggah Berita Resmi Statistik (BRS) melalui website, dan juga mensosialisasikan data BPS secara intensif khususnya kepada K/L/D/I yang ada di BPS Provinsi Aceh. Dengan beberapa strategi tersebut, diharapkan pengguna data khususnya yang berasal dari K/L/D/I mengetahui ketersediaan data yang ada di BPS dan dapat dijadikan referensi dalam perencanaan pembangunan.

- b. Menyediakan penjelasan yang lengkap kepada pengunjung PST agar mengetahui sarana prasarana baik secara fisik di BPS Provinsi Aceh maupun online di media sosial/website.
- c. Meningkatkan cakupan responden SKD yang berasal dari dinas/instansi agar lebih mengetahui manfaat dari diperolehnya data BPS.

3.4. Prestasi dan Inovasi Tahun 2021

Berbagai penghargaan diperoleh BPS Provinsi Aceh atas prestasi kerja sampai dengan tahun 2021, baik dari internal BPS maupun eksternal BPS.

Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan atas kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun dan merupakan buah dari implementasi nilai-nilai inti BPS yaitu Profesional, Integritas, dan Amanah (PIA) oleh seluruh jajaran pada BPS Provinsi Aceh. Komitmen pimpinan BPS Provinsi Aceh dengan kerja sama tim dari SDM yang semakin berkualitas telah meningkatkan kinerja BPS sampai dengan tahun 2021.

Penghargaan yang diterima oleh BPS Provinsi Aceh pada tahun 2021 adalah:

Internal BPS

- a. BPS Provinsi Aceh beserta dengan 6 BPS Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh di tetapkan sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021



- b. BPS Provinsi Aceh sebagai Satuan Kerja dengan *User Engagement* Konten Promosi Unggulan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik



Eksternal BPS

- a. BPS Provinsi Aceh sebagai Satuan Kerja Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Tahun 2020 Kategori UAPPA-W Besar di Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Aceh



- b. BPS Provinsi Aceh memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Aceh atas keikutsertaan pada Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



- c. BPS Kabupaten Bener Meriah sebagai Satker Peringkat Pertama dalam rangka Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Non Reaktifitas Bobot konversi >68%) Tahun Anggaran 2020 di Lingkup KPPN Takengon



- d. BPS Kabupaten Bener Meriah sebagai Satker Peringkat Pertama dalam rangka Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktifitas Bobot konversi < 58%) Tahun Anggaran 2020 di Lingkup KPPN Takengon



- e. BPS Kota Lhokseumawe sebagai Satker Lingkup KPPN Lhokseumawe yang Menyampaikan Gaji Induk Tercepat dan Akurat Periode Bulan November Tahun 2021



- f. BPS Kabupaten Nagan Raya sebagai Satuan Kerja dengan Keuangan Terbaik Tahun 2020 Kategori Pagu DIPA Sedang yang ditetapkan oleh KPPN Meulaboh



- g. BPS Kabupaten Nagan Raya sebagai Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Unaudited Terbaik II Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan oleh KPPN Meulaboh



- h. BPS Kabupaten Nagan Raya sebagai Sebagai Satuan Kerja dengan Penyampaian Gaji Induk Bulan Januari Tercepat Tahun 2022 yang ditetapkan oleh KPPN Meulaboh



3.5 Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

Kegiatan prioritas BPS Provinsi Aceh pada tahun 2021 mencakup beberapa kegiatan prioritas nasional, yaitu:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk;

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

Sensus Penduduk (SP) Merupakan satu dari tiga sensus yang

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia statistik dasar di Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Gelaran sepuluh tahunan sekali di tahun berakhiran angka 0 ini sangat penting karena mendata seluruh penduduk Indonesia. Hasil SP digunakan sebagai basis data kependudukan yang akan dimanfaatkan tidak hanya untuk kementerian/lembaga (K/L) tetapi juga untuk non pemerintah dalam membuat kebijakan karena bisa disajikan sampai wilayah administrasi terkecil.

Pada tahun 2020, BPS telah menyelenggarakan SP, yang merupakan SP ketujuh. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan Indonesia yang semakin berkualitas. Kegiatan ini secara serentak akan dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam SP2020, BPS mengikuti rekomendasi PBB dengan menggunakan metode kombinasi. Dengan penerapan metode ini, pengumpulan data terbagi menjadi dua tahap, yaitu sensus online dan pendataan lapangan. Di tahapan sensus *online*, penduduk diimbau untuk melakukan pembaruan data kependudukan pribadi secara online melalui website *sensus.bps.go.id*. Data dasar kependudukan yang digunakan bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Hingga tenggat waktu periode sensus online yang telah ditetapkan akan dilakukan verifikasi. Bagi penduduk yang tidak melakukan sensus online, akan dilakukan pendataan lapangan secara *door to door*.



Talkshow Sosialisasi SP Online di RRI

Rangkaian kegiatan SP2020 dilaksanakan ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan *short form* dan instrumen lainnya pada tahun 2020 kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan *long form* pada tahun 2022. Pada tahapan tahun 2020, pendataan dilakukan dengan Sensus Penduduk *Online* dan Sensus Penduduk September 2020.

Sensus Penduduk September 2020 dilakukan dengan membagi menjadi tiga zona wilayah. Wilayah zona 1 adalah wilayah PAPI yang kemudian dilakukan penyesuaian pengumpulan data dengan metode *Drop Off Pick Up* (DOPU). Zona 2 adalah wilayah CAPI yang pendataannya hanya menggunakan SP2020-DP tanpa pendataan dengan SP2020-C1. Zona 3 adalah wilayah yang pendataannya tetap menggunakan mekanisme wawancara tatap muka yaitu wilayah Papua dan Papua Barat. Output dari tahapan di tahun 2020 adalah jumlah penduduk Indonesia yang dirinci ke dalam beberapa variabel. Data-data terkait parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi penting lainnya dikumpulkan untuk menghasilkan indikator SDGs dan RPJMN bidang kependudukan.

Dalam rangka mendapatkan parameter demografi yang akurat perlu dilakukan kegiatan sensus penduduk lanjutan dimana pendataan dilaksanakan untuk mengumpulkan data-data yang lebih lengkap tidak hanya terkait parameter demografi, tetapi juga terkait pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan maupun perumahan. Oleh karenanya, dirancang adanya sensus sampel sebagai sensus penduduk lanjutan di tahun 2021 menggunakan kuesioner yang memuat pertanyaan yang lebih banyak dan lebih kompleks atau disebut sebagai pendataan *long form* SP2020. Kegiatan tersebut diawali dengan pemutakhiran rumah tangga dan pemilihan sampel diikuti dengan pendataan rumah tangga terpilih di seluruh wilayah sampel yang tersebar di Indonesia.

Selain itu, mengingat pentingnya hasil dari pendataan *long form* ini, maka akan dilakukan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) di dalam rangkaian kegiatan pendataan. Hal ini ditujukan sebagai upaya menjaga kualitas data hasil pendataan *long form* SP2020. Pandemi *Covid-19* yang belum diketahui kapan berakhir membuat BPS menunda pendataan *long form* SP2020 yang semula direncanakan di tahun 2021 menjadi tahun 2022.

Dalam rangka persiapan pendataan *long form* di tahun 2022, untuk memperkuat kerangka sampel dan pembaharuan *prelist* yang sudah tersedia hasil SP2020 maka perlu dilakukan kegiatan pra pemutakhiran. Kegiatan ini juga dirancang untuk dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan Sensus Pertanian dan survei lainnya.

Pelaksanaan Pra Pemutakhiran *Long Form* SP2020 di BPS Provinsi Aceh dilaksanakan mulai tanggal 17-31 Oktober 2021 dan diperpanjang hingga 10 November 2021. Untuk wilayah PAPI pelaksanaan lapangan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan wilayah CAPI pelaksanaan lapangan di beberapa BS melewati jadwal yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya petugas HP rusak, sinyal yang

kurang baik dan muatan BS yang terlalu banyak.



Dokumentasi Kegiatan Pra Pemutakhiran Long Form SP2020

Setelah pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) selesai, BPS Provinsi Aceh melaksanakan pengolahan dokumen SP2020-C1 pada Tahun 2021. Meski di tengah pandemi corona virus, pengolahan C1 harus tetap dilakukan dengan melakukan penyesuaian proses pengolahan baik data *capture* maupun data entri untuk efektifitas proses dan efisiensi anggaran.

Data *capture* menggunakan *system auto filtering* dan data entri diterapkan mekanisme entri sesuai dengan kondisi dokumen proses pengolahan fokus pada beberapa variabel inti yang akan dimanfaatkan oleh SM untuk menghasilkan data karakteristik penduduk Indonesia.



Dokumentasi Pengolahan SP2020-C1 Tahun 2021

2. Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan Tahun 2020

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDB dan penyediaan lapangan kerja. Subsektor tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai merupakan komoditi yang sangat strategis dan menjadi salah satu ukuran ketahanan pangan nasional. Untuk itu pemerintah setiap tahun berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan. Formulasi berbagai program peningkatan produksi tanaman pangan memerlukan dukungan data yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, setiap tahun dilakukan pengumpulan data luas panen dan data rata-rata produksi per hektar (produktivitas) untuk bahan penghitungan produksi tanaman pangan.

Metode ubinan adalah cara memperkirakan berapa hasil panen nanti untuk tanaman yang bersifat atau tergolong berumpun. Metode ini biasa dilakukan oleh petani tanaman pangan (padi). Mengapa untuk memperkirakan hasil tanaman padi dilakukan dengan metode ubinan? Tanaman padi adalah tanaman rumpun dengan jarak yang tidak mudah dipisahkan antara tanaman satu dengan lainnya.

Mulai Tahun 2020, BPS melakukan Survei Ubinan Padi Berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan Moda Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).



Kegiatan Ubinan di Lapangan oleh Petugas di Kabupaten/Kota Tahun 2021

Tujuan pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah:

1. Mendapatkan data luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan;
2. Mendapatkan data produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan;
3. Mendapatkan data luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah;
4. Mendapatkan data banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan);
5. Mendapatkan data keterangan tentang perbenihan.

Dengan cepatnya peluang ketersediaan data luas panen padi melalui pendatan dengan metode KSA, maka dukungan data produktivitas yang juga dapat disajikan secara cepat sangat diperlukan. Dengan melakukan Survei Ubinan berbasis KSA, maka

petugas tidak perlu lagi melakukan listing untuk rumah tangga yang mengusahakan padi karena frame dari sampel ubinan sudah berdasarkan segmen KSA yang menjadi target sampel tiap bulannya.

BPS Provinsi Aceh melakukan pengawasan berkala melalui monitoring pengecekan DSRT sehingga mendorong BPS kab/kota merencanakan penyelesaian ubinan (baik jadwal, petugas, kecukupan sampel terhadap target dan metode pengumpulan datanya).

3. Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Metode KSA ;

Sistem statistik produksi pertanian saat ini menjadi perdebatan tentang reliabilitas data dan informasi produksi yang dihasilkan. Polemik tersebut timbul diakibatkan adanya kelemahan dalam sistem perolehan data yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Produktivitas (ku/ha) didasarkan pada sistem ubinan (cutting plot) yang jumlah sampel dan distribusinya ditetapkan oleh BPS secara acak-proporsif. Sedangkan luas panen didasarkan pada estimasi sistem SP pangan yang dilakukan oleh MANTAN (Mantri Tani) atau KCD sering dikenal dengan pendekatan Eye estimate (BPS, 1993). Hasil estimasi luas panen tersebut tentunya mengandung bias karena faktor subyektivitas. Untuk memperbaiki akurasi dan aktualitas data diperlukan suatu sistem estimasi produksi padi yang lebih akurat, lebih cepat dan dan lebih obyektif.

Dengan kemajuan teknologi GIS dan penginderaan jauh, teknologi spasial diwujudkan dalam suatu sistem Kerangka Sampel Area (KSA) dan sistem komunikasi data dari lapangan ke pusat akan dibangun dengan memanfaatkan sistem *SMS Server*.



Petugas KSA yang sedang Mengambil Titik Amatan di Tengah Banjir Sawah

Tujuan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Indonesia dengan metode KSA adalah untuk memperoleh data luas tanaman padi, jagung, dan kedelai (luas panen, luas tanam, dan luas puso) yang dikumpulkan dengan menggunakan metode *objective measurement*. Dengan menggunakan metode KSA, luas panen padi dan jagung beserta produksinya dapat tersedia dalam jangka waktu bulanan dan dapat dilihat potensi untuk tiga bulan ke depan.

Tahap persiapan Survei Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area dilakukan oleh BPS RI, BPPT, BPS Provinsi Aceh, dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten/Kota melakukan pendataan di lapangan dan melakukan pemeriksaan hasil pendataan tersebut. BPS provinsi melakukan pengecekan dan pemantauan hasil pendataan. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan alokasi petugas dilakukan secara proporsional pada seluruh area amatan.

4. Statistik E – Commerce 2021

Pesatnya perkembangan ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk membangun regulasi yang mengatur tentang ekonomi berbasis elektronik dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV mengenai e-commerce. Pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan *E-commerce* untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan *e-commerce* ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pada tahun 2017 diterbitkan Perpres No. 74 tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau SPNBE. Dengan keluarnya perpres itu, maka pemerintah melihat bahwa perlu ketersediaan data *e-commerce* yang dapat memetakan perkembangan *e-commerce* di Indonesia, sebagai *evidence based policy making* dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklim, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam perdagangan dengan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan PMSE.

Dalam rangka pemetaan e-commerce di Indonesia, BPS melanjutkan pendataan *e-commerce* berbasis usaha rumah tangga dan perusahaan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha e-commerce di Indonesia, dari sudut pandang pelaku usaha e-commerce. Metoda pendataan e-commerce yang akan dilakukan pada

tahun 2020, akan menyesuaikan dengan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Era Digital saat ini.

Penggunaan TIK dalam metode pengumpulan data menjadi tak terhindarkan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat di Era Digital saat ini yang memerlukan data dan informasi secara cepat, mudah, dan akurat *at anytime and anywhere*. Untuk itu, pendataan *e-commerce* 2020 akan diarahkan pada metoda Go Digital. Survei ini rencananya akan dilakukan dengan teknik konvensional, mendatangi bangunan sensus dan bangunan fisik di blok sensus terpilih. Namun, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pendataan seluruh usaha secara langsung (*listing*) tidak dapat dilaksanakan. Sehingga kerangka sampel yang digunakan adalah hasil *listing* usaha/perusahaan dari Survei *E-commerce* Tahun 2019. Pendataan *E-commerce* dilakukan dengan metode CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) yang memungkinkan responden untuk mengisi sendiri melalui *website*. Selain itu, teknik *crawling* juga akan diterapkan untuk melengkapi daftar pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk memutakhirkan *sampling frame* usaha *e-commerce*.

5. Survei Wisatawan Nusantara

Aktivitas pariwisata di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang, bahkan mulai menjadi trend dan gaya hidup tersendiri dalam masyarakat. Sehingga kegiatan pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang terkait erat. Pemerintah selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa, juga sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (*wisnus*). Meskipun *wisnus* tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama kemampuannya dalam menggerakkan perekonomian negara melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Perjalanan yang dilakukan oleh

wisatawan nusantara mampu menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya.

Kegiatan pendataan wisnus dimulai sejak tahun 1981. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu modul dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 3 tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun 1984, 1991, 1994, 1997, 2002, 2003, dan 2008. Angka tahunan yang digunakan merupakan proyeksi dari data hasil kegiatan tersebut. Mulai tahun 2011, seiring dengan perubahan perodesasi Susenas, pendataan wisnus dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan). Kegiatan ini dicakup dalam Susenas KOR sehingga data tahunannya diperoleh dari gabungan empat triwulan. Data ini kemudian digunakan sebagai kerangka sampel dalam kegiatan Survei Profil Wisatawan Nusantara. Namun sejak triwulan empat tahun 2014, kegiatan pendataan tersebut berhenti seiring dengan perubahan periode pendataan Susenas. Pada tahun 2015 hingga saat ini, Susenas KOR hanya dilakukan sekali setahun yaitu pada bulan Maret. Keadaan ini akan sangat berpengaruh jika data perjalanan (wisnus) diambil dari susenas KOR, terutama data mengenai jumlah perjalanan selama satu tahun. Pendataan profil wisnus pada tahun 2015 tidak menggunakan kerangka sampel dari data Susenas KOR karena pengolahan datanya belum selesai pada saat kegiatan dilakukan.

Maksud dan Tujuan dari Survei Wisatawan Nusantara adalah:

1. Menghitung jumlah wisatawan nusantara selama satu tahun menurut kabupaten asal, kabupaten tujuan, moda transportasi, lamanya tinggal, dan pengeluaran selama melakukan kegiatan wisata yang dirinci menurut jenis pengeluaran, lokasi yang dikunjungi. Penghitungan dilakukan melalui jejak pergerakan handphone (MPD data) dan survei digital.
2. Mendapatkan data pergerakan penduduk komuter dan sirkuler di 514 (seluruh kabupaten/kota).

3.6 Upaya Efisiensi di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

Pelaksanaan anggaran di BPS Provinsi Aceh senantiasa mengacu kepada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dalam menghasilkan output berkualitas. Salah satu bentuk kegiatan BPS Provinsi Aceh yang mengacu prinsip 3E tersebut adalah melakukan pelatihan terintegrasi. Walaupun pelatihan tersebut dilakukan terintegrasi namun seluruh output masing-masing kegiatan yang telah ditargetkan tetap tercapai. Sumber efisiensi berasal dari (1) Anggaran belanja operasional pada berbagai kegiatan survei rutin dilakukan dengan cara melakukan integrasi pelaksanaan kegiatan yang jadwal pelaksanaannya bersamaan dan pengolahan survei rutin dimaksimalkan menggunakan pegawai organik sehingga tidak perlu dibayarkan honorinya, (2) Penghematan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan ke Kabupaten/Kota dan (3) Efisiensi pada belanja bahan dan operasional perkantoran lainnya, seperti konsumsi rapat, pengiriman dokumen dan kelebihan belanja paket meeting.

Penghematan juga dilakukan pada belanja daya dan jasa dalam rangka operasional perkantoran. Pimpinan BPS Provinsi Aceh menghimbau kepada seluruh pegawai untuk melakukan penghematan penggunaan daya dan jasa (listrik, air dan telepon). Himbauan ini disampaikan pada kegiatan apel, dengan cara mematikan PC, AC dan lampu apabila tidak digunakan dan penghematan BBM kendaraan operasional.

Tabel 16.
Realisasi Belanja Operasional BPS Provinsi Aceh Tahun 2020 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belanja Langganan Listrik	275.119.999	267.606.087
2.	Belanja Layanan Telepon	51.325.137	50.931.803
3.	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	120.000.000	5.500.000
4.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.225.000	168.253.000

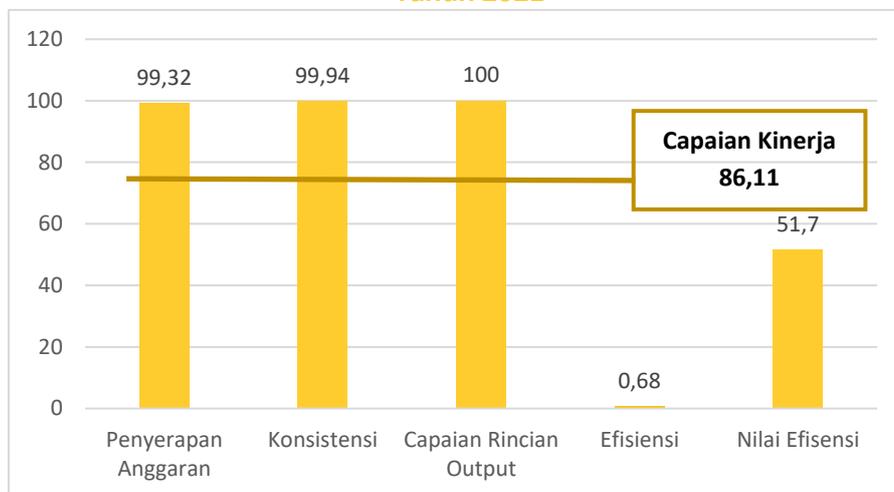
Pelaksanaan anggaran di BPS Provinsi Aceh senantiasa mengacu kepada prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dalam menghasilkan output berkualitas. Bentuk kegiatan BPS Provinsi Aceh yang mengacu prinsip 3E tersebut antara lain:

1. Melakukan Pelatihan Petugas secara Virtual. Dikarenakan masa pandemi COVID-19, untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, BPS Provinsi Aceh melakukan beberapa pelatihan secara virtual dengan media *virtual zoom/google meet*. Pelatihan virtual ini telah mengefisiensi waktu dan anggaran terutama perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan. Walaupun pelatihan tersebut dilakukan virtual namun seluruh output masing-masing kegiatan yang telah ditargetkan tetap tercapai.
2. Supervisi Pelaksanaan Kegiatan ke BPS Kabupaten/Kota Terintegrasi. Pada kegiatan supervisi pelaksanaan kegiatan ke BPS Kabupaten/Kota juga selalu dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga setiap supervisor ke Kabupaten/Kota selalu ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, baik teknis maupun administrasi.

3. Bekerjasama dengan *Dealer* Resmi dalam Pemeliharaan Kendaraan Operasional. Kendaraan operasional milik BPS Provinsi Aceh selalu diservis rutin, untuk meminimalisasi biaya, waktu, dan tenaga serta lebih mudah dalam memantau pemeliharaan rutin baik dalam segi administrasi maupun teknis. BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan salah satu servis kunjung dari dealer resmi secara berkala.
4. Pembagian Hari Kerja Pegawai menjadi *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH). Pembagian hari kerja WFO dan WFH juga menyumbang efisiensi anggaran BPS Provinsi Aceh dari segi penggunaan listrik, air, dan ATK di kantor.
5. Penghematan biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan ke Kabupaten/Kota dan efisiensi pada belanja bahan dan operasional perkantoran lainnya, seperti konsumsi rapat, pengiriman dokumen dan kelebihan belanja paket meeting.

Efisiensi juga dapat dilihat dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART yang berbasis *web* berfungsi untuk mengevaluasi nilai kinerja anggaran tingkat satker dari aspek implementasi. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran menjadi lebih sederhana, terupdate secara *online*, data lebih akurat. Berdasarkan aplikasi SMART terlihat efisiensi pada tahun 2021 BPS Provinsi Aceh mencapai sebesar 0,68 persen. Nilai ini lebih kecil dibandingkan efisiensi tahun sebelumnya (7,58 persen). Hal ini berarti BPS Provinsi Aceh telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 0,68 persen dari pengeluaran seharusnya untuk meraih capaian rincian output sebesar 100 persen.

Gambar 4.
Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh menurut Aplikasi SMART
Tahun 2021



Efisiensi juga ditunjukkan dari perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran. Untuk mencapai tujuan pertama “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” berdasarkan anggaran yang terealisasi, terdapat efisiensi sebesar 1,25 persen. Tujuan kedua “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN”, BPS Provinsi Aceh telah melakukan efisiensi sebesar 0,88 persen. Pada tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”, jika dibandingkan capaian dan realisasi anggarannya terdapat efisiensi sebesar 0,44 persen. Kemudian, tujuan keempat “Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” terdapat efisiensi sebesar 0,47 persen.

Tabel 17.
Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2021

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		110,00	98,75	1,25
		1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110,00	98,75	1,25
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN		110,00	99,12	0,88
		2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110,00	99,12	0,88
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		120,00	99,56	0,44
		3.1 Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I	120,00	99,56	0,44
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		110,00	99,53	0,47
		4.1 SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	110,00	99,53	0,47

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Provinsi Aceh, tetap mengacu kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang tersedia. Pada tahun 2021 BPS Provinsi Aceh melakukan 11 kali revisi DIPA dalam rangka penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan.

a. **Revisi DIPA 1** pada tanggal 10 Februari 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021, mempercepat pencapaian kinerja KL Tahun 2021. Adanya perubahan pada rincian output Laporan penyelenggaraan Sistem Informasi Statistik Nasional (SSN), Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik, Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran, Publikasi/Laporan Neraca Produksi, Dokumen Laporan dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Terbit Tepat Waktu, Publikasi/Laporan Statistik Statistik Harga, Publikasi/Laporan Statistik Industri Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi, Publikasi/Laporan Sakernas, Publikasi/Laporan Sensus Penduduk, Publikasi/Laporan Susenas, Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial, Publikasi/Laporan Pendataan Podes, Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Terbit Tepat Waktu, Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce, Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu, Publikasi/Laporan Statistik Holtikultura dan Perkebunan, Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area, Layanan Administrasi Pegawai, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Laporan Keuangan dengan total

pengurangan pagu anggaran BPS Provinsi Aceh sebesar Rp. 1.856.576.000,-.

- b. **Revisi DIPA 2** pada tanggal 12 April 2021 dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Adanya perubahan pada belanja operasional dalam satu keluaran (*output*), rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, dan Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Tidak terdapat perubahan total nilai pagu.
- c. **Revisi DIPA 3** pada tanggal 27 Mei 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mempercepat pencapaian kinerja K/L Tahun 2021 dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 1.113.862.000,-.
- d. **Revisi DIPA 4** pada tanggal 9 Juli 2021 dilaksanakan guna mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran terbatas, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tidak terdapat perubahan total nilai pagu.
- e. **Revisi DIPA 5** pada tanggal 19 Juli 2021 dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mempercepat pencapaian kinerja K/L Tahun 2021 dan mempercepat kenaikan volume RO, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 3.613.150.000,-.
- f. **Revisi DIPA 6** pada tanggal 2 Agustus 2021 dilaksanakan dalam rangka perubahan kebijakan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV, memperlancar kegiatan

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2021, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 3.927.101.000,-.

- g. **Revisi DIPA 7** pada tanggal 27 September 2021 dilaksanakan atas dasar kelancaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2021, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 72.643.000,-.
- h. **Revisi DIPA 8** pada tanggal 13 Oktober 2021 dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, dan pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tidak terdapat perubahan total nilai pagu.
- i. **Revisi DIPA 9** pada tanggal 29 November 2021 dilaksanakan guna mempercepat pencapaian kinerja K/L dan atau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran, tidak terdapat perubahan total nilai pagu.
- j. **Revisi DIPA 10** pada tanggal 20 Desember 2021 dilaksanakan atas dasar Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan, tidak terdapat perubahan total nilai pagu.
- k. **Revisi DIPA 11** pada tanggal 28 Desember 2021 dilaksanakan atas dasar Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan, tidak terdapat perubahan total nilai pagu.

Dari 11 kali revisi DIPA terdapat 4 kali revisi yang masuk dalam katagori *refocusing*/penghematan anggaran yaitu Revisi DIPA 1, Revisi DIPA 3, Revisi DIPA 5 dan Revisi DIPA 6 yang dilaksanakan guna mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan total penghematan sebesar Rp. 10.510.689.000,-

3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada tahun 2021 pagu awal yang diterima oleh BPS Provinsi Aceh sebesar Rp29.277.096.000,- yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen (DUKMAN) dengan pagu sebesar Rp14.347.131.000,- dan ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar Rp14.929.965.000,-.

Dari pagu tersebut, BPS Provinsi Aceh melakukan 11 (sebelas) kali revisi DIPA. Total pagu yang dikelola oleh BPS Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp18.839.050.000,-.

Dari pagu tersebut, realisasinya pada tahun 2021 mencapai 99,32 persen. Realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang mencapai 92,53 persen dari total pagu.

Tabel 18.
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

Program	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
DMPTTL	14.929.965.000	13.814.141.000	13.748.892.893	99,53	65.248.107
PPIS	14.347.131.000	5.024.909.000	4.962.228.623	98,75	62.680.377
Jumlah	29.277.096.000	18.839.050.000	18.711.121.516	99,32	127.928.484

Berdasarkan **Tabel 18**, penyerapan anggaran program DMPTTL adalah sebesar 99,53 persen dari pagu anggaran program DMPTTL dan penyerapan anggaran program PPIS adalah sebesar 98,75 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS sedikit lebih kecil dari program DMPTTL. Penyerapan anggaran BPS Provinsi Aceh secara keseluruhan adalah sebesar 99,32 persen dari total pagu anggaran.

Penyerapan anggaran pada program DMPTTL dan PPIS yang tidak mencapai 100 persen menunjukkan adanya efisiensi yang dilaksanakan. Efisiensi bersumber dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas.

Tabel 19.
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja pada BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
Belanja Pegawai	11.202.887.000	11.168.887.364	99,70
Belanja Barang	6.247.244.000	6.160.491.098	98,61
Belanja Modal	1.388.919.000	1.381.743.054	99,48
JUMLAH	18.839.050.000	18.711.121.516	99,32

Jenis belanja negara yang dikelola BPS Provinsi Aceh pada Tahun 2021 didominasi oleh belanja pegawai dengan total anggaran sebesar Rp11.202.887.000,- dan realisasi sebesar 99,70 persen, disusul dengan belanja barang dengan total anggaran Rp6.247.244.000,- dengan realisasi sebesar 98,61 persen dan terakhir belanja modal dengan total anggaran Rp1.388.919.000,- dengan realisasi sebesar 99,48 persen.

Tabel 20.
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis BPS Tahun 2021

Sasaran Strategis	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	4.988.359.000	4.925.952.223	62.406.777	98,75
SS2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	25.280.000	25.056.400	223.600	99,12
SS3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	11.270.000	11.220.000	50.000	99,56
SS4.1. SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola	13.814.141.000	13.748.892.893	65.248.107	99,53
JUMLAH	18.839.050.000	18.711.121.516	127.928.484	99,32

Menurut sasaran kinerja, anggaran terbesar dialokasikan untuk pencapaian sasaran “SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola” yaitu sebesar Rp13.814.141.000,-. Dari anggaran yang disediakan, realisasinya mencapai 99,53 persen atau sebesar Rp.13.748.892.893,-.

Sasaran kinerja selanjutnya yaitu “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas” mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua yaitu Rp4.988.359.000,-. Realisasinya mencapai 98,75 persen atau sebesar Rp4.925.952.223,-.

Sasaran “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN” mendapat alokasi anggaran sebesar Rp25.280.000,- dengan realisasi mencapai 99,12 persen atau sebesar Rp25.056.400,-.

Sasaran kinerja yang terakhir, yaitu “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.988.359.000,- dengan realisasi mencapai 98,75 persen atau sebesar Rp4.925.952.223,-.



BAB 4

PENUTUP





4.1. Tinjauan Umum

BPS Provinsi Aceh senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Dalam hal penyusunan dokumen kinerja mulai dari dokumen perencanaan ataupun dokumen anggaran hingga pengukuran dan evaluasi kinerja, BPS Provinsi Aceh telah bersinergi antar fungsi dan bagian melalui tim SAKIP yang telah dibentuk. Tim SAKIP yang beranggotakan perwakilan bidang/bagian dibentuk supaya aspirasi usulan maupun permasalahan yang dihadapi masing masing bidang/bagian dapat terakomodir dan tersampaikan ke jajaran pimpinan.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2021 merupakan perwujudan tanggung jawab BPS Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemerintah di dalam pencapaian pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah selama tahun 2021. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Aceh dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2020-2024, yang terdiri dari empat tujuan dan lima sasaran strategis. Ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS pada tahun 2020, yaitu:

1. Tujuan pertama yaitu, “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan indikator capaian tujuan strategis, “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dengan capaian sebesar 110 persen,
2. Tujuan kedua yaitu, “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN”, dengan indikator kinerja tujuan strategis “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN”, dengan

capaian sebesar 110 persen,

3. Tujuan ketiga yaitu, “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN”, dengan indikator tujuan strategis “Penguatan statistik sektoral K/L/D/I”, dengan capaian sebesar 120 persen, dan

4. Tujuan keempat “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, dengan indikator tujuan strategis “SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan”, dengan capaian sebesar 110 persen.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS tahun 2021 sepenuhnya telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 111,43 persen. Meskipun demikian, upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh terutama dalam hal peningkatan pelayanan prima serta penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

4.2. Tantangan dan Kendala Utama

Secara umum BPS Provinsi Aceh telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2021 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data serta tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya

- data dasar) bagi para pengguna data;
2. Faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan;
 3. *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Aceh;
 4. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik.
 5. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Aceh.
 6. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

4.3. Saran Tindak Lanjut

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh selanjutnya adalah:

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi, Memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun *respondent engagement*), dan meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah;
2. Mengadakan berbagai pelatihan/*briefing* untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* yang dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik dan lain sebagainya;
3. Peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden, baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha serta berkoordinasi dengan penguasa wilayah setempat secara berkesinambungan;
4. Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi/BPS Kabupaten/kota dan SKPD;

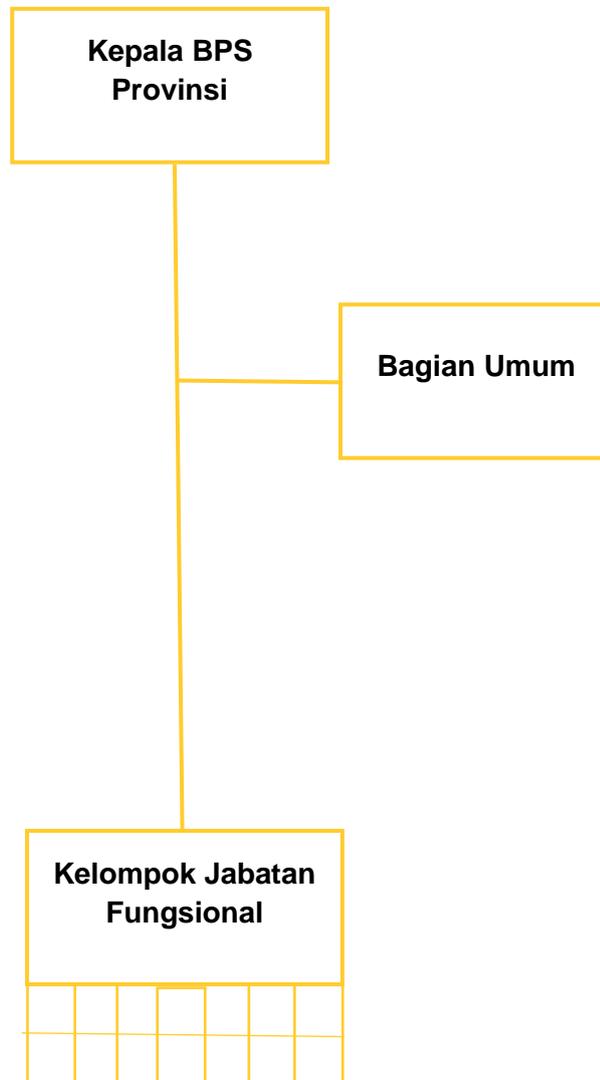
5. Pengadaan barang-barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat;
6. Mendokumentasikan dengan baik segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

LAMPIRAN





Lampiran 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi Aceh



Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrase, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	30,00	30,00	30,00	30,00	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IPDS
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat	71,00	71,3	71,5	71,8	72,0	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98,00	98,0	98,0	98,0	98,0	Tata Usaha

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsanurijal, S.Si, M.Si.
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

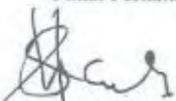
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si.
NIP. 19630605 198702 1 001

Banda Aceh, 8 Februari 2021
Pihak Pertama


Ihsanurijal, S.Si, M.Si.
NIP. 19630921 198702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BPS PROVINSI ACEH

Tujuan/Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	80,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	1,79
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100,00
	Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	15,00
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	20,00

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	71,30
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi (%)	Persen	85,00

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	Rp. 14.347.131.000
2. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 14.929.965.000
Jumlah	Rp. 29.277.096.000

Sekretaris Utama BPS

Margo

Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si.
NIP. 19630605 198702 1 001

Banda Aceh, 8 Februari 2021
Kepala BPS Provinsi Aceh

Ihsanurrijal

Ihsanurrijal, S.Si, M.Si.
NIP. 19630921 198702 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
SS1.1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	80,00	100,00	120,00
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	1,79	1,79	100,00
T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
SS2.1	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	Tw I	100,00	100,00	100,00
				Tw II	100,00	100,00	100,00
				Tw III	100,00	100,00	100,00
				Tw IV	100,00	100,00	100,00
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	Tw I	2,5	2,5	16,67
				Tw II	7,5	7,5	50,00
				Tw III	12,5	7,5	50,00
				Tw IV	15,00	35,00	120,00
T3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
SS3.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	Tw I	0	20	100
				Tw II	20	20	100
				Tw III	20	20	100
				Tw IV	20	260	120
T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS4.1	SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	71,30	74,18	104,04
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	85,00	98,57	115,96
Rata-Rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Aceh							111,43

Lampiran 5. Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2021	Realisasi 2021	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
01-Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			110,00	4.988.359.000	4.925.952.223	98,75	10,23
	1.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas		110,00	4.988.359.000	4.925.952.223	98,75	10,23
		054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		4.988.359.000	4.925.952.223		
		NERWILIS 2896.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK		19.970.000	18.036.500		
		NERWILIS 2898.BMA.007 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN		112.715.000	110.868.816		
		NERWILIS 2899.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI		140.934.000	140.425.760		
		IPDS 2900.BMA.005 DOKUMEN LAPORAN DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI		5.974.000	5.727.600		
		DISTRIBUSI 2902.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI YANG TERBIT TEPAT WAKTU		216.873.000	213.523.490		
		IPDS 2901.BMA.002 SISTEM INFORMASI/APLIKASI YANG DIBUAT/DIKEMBANGKAN/DIPELIHARA		1.017.500.000	1.017.500.000		
		DISTRIBUSI 2903.BMA.009 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA		414.479.000	399.969.800		
		PRODUKSI 2904.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ENERGI DAN KONSTRUKSI		121.790.000	112.964.829		
		SOSIAL 2905.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN SAKERNAS		307.760.000	307.365.578		
		SOSIAL 2905.QMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK		1.374.274.000	1.372.644.194		
		SOSIAL 2906.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS		563.980.000	554.256.649		
		SOSIAL 2907.BMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL		104.026.000	103.751.782		
		SOSIAL 2907.BMA.008 PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES		167.564.000	167.502.510		
		DISTRIBUSI 2908.BMA.004 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA YANG TERBIT TEPAT WAKTU		33.173.000	31.965.200		
		DISTRIBUSI 2908.QMA.006 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA		41.104.000	39.748.600		
		DISTRIBUSI 2908.QMA.009 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK E-COMMERCE		146.194.000	144.294.660		
		PRODUKSI 2909.BMA.005 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU		163.651.000	159.124.600		
		PRODUKSI 2910.BMA.008 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		19.065.000	15.112.655		
		PRODUKSI 2910.QMA.007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN		8.948.000	3.975.000		
		PRODUKSI 2910.QMA.010 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA		8.385.000	7.194.000		
02-Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			110	25.280.000	25.056.400	99,12	9,89
	2.1-Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN		110	25.280.000	25.056.400	99,12	9,89
		054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		25.280.000	25.056.400		
		IPDS 2897.BMA.004 LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK		25.280.000	25.056.400		
03-Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			120	11.270.000	11.220.000	99,56	17,04
	3.1-Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I		120	11.270.000	11.220.000	99,56	17,04
		054.01.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		11.270.000	11.220.000		
		IPDS 2897.BDB.003 LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)		11.270.000	11.220.000		
04-Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			110	13.814.141.000	13.748.892.893	99,53	9,52
	4.1-SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		110,00	13.814.141.000	13.748.892.893	99,53	9,52
		054.01.WA Program Dukungan Manajemen		13.814.141.000	13.748.892.893		
		TATA USAHA 2886.EAA.001 Gaji dan Tunjangan		11.202.887.000	11.168.887.364		
		TATA USAHA 2886.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.033.985.000	2.018.427.515		
		TATA USAHA 2886.EAB.001 Layanan Standar Biaya		6.870.000	6.870.000		
		TATA USAHA 2886.EAB.003 Dokumen RKA-KL		1.800.000	1.328.000		
		TATA USAHA 2886.EAC.001 Layanan Kerumahtanggaan		6.823.000	6.818.000		
		TATA USAHA 2886.EAC.003 Layanan Pengelolaan BMN		4.691.000	4.280.000		
		TATA USAHA 2886.EAD.003 Peralatan Fasilitas Perkantoran		343.564.000	336.389.554		
		TATA USAHA 2886.EAF.001 Layanan Administrasi Pegawai		167.160.000	164.559.860		
		TATA USAHA 2886.EAF.004 Layanan Jabatan Fungsional		5.200.000	5.200.000		
		TATA USAHA 2886.EAH.001 Layanan Transformasi BPS		14.400.000	11.026.500		
		TATA USAHA 2886.EAI.001 Layanan Humas		2.800.000	2.605.000		
		TATA USAHA 2886.EAL.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		8.679.000	7.975.500		
		TATA USAHA 2886.EAN.003 Laporan Keuangan		15.282.000	14.525.600		

Lampiran 6. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Unit Organisasi	Tingkat Pendidikan					Total
		≤SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
1	Bagian Umum	5	3	16	4	-	28
2	Fungsi Statistik Sosial	1	-	4	4	-	9
3	Fungsi Statistik Produksi	-	-	9	1	-	10
4	Fungsi Statistik Distribusi	3	-	7	3	-	13
5	Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	-	-	3	6	1	10
6	Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	-	-	9	3	-	12
Total		9	3	48	21	1	82

Lampiran 7. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Unit Organisasi	Jabatan			Total
		Pejabat Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	
1	Bagian Umum	1	7	20	28
2	Fungsi Statistik Sosial	-	8	1	9
3	Fungsi Statistik Produksi	-	8	2	10
4	Fungsi Statistik Distribusi	-	12	1	13
5	Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	-	9	1	10
6	Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	-	6	6	12
Total		1	50	31	82

Lampiran 8. Jumlah Pegawai Menurut Golongan di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Unit Organisasi	Golongan				Total
		IV	III	II	I	
2	Bagian Umum	3	23	2	-	28
3	Fungsi Statistik Sosial	2	7	-	-	9
4	Fungsi Statistik Produksi	2	8	-	-	10
5	Fungsi Statistik Distribusi	1	12	-	-	13
6	Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	3	7	-	-	10
7	Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	1	11	-	-	12
Total		12	68	2	-	82

Lampiran 9. Jumlah Pegawai Menurut Usia di BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Unit Organisasi	Golongan				Total
		>50	41-50	31-40	<=30	
1	Bagian Umum	3	5	18	2	28
2	Fungsi Statistik Sosial	-	1	7	1	9
3	Fungsi Statistik Produksi	4	-	6	-	10
4	Fungsi Statistik Distribusi	1	3	9	-	13
5	Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	1	3	5	1	10
6	Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	2	2	6	2	12
Total		11	14	51	6	82

Lampiran 10. Kegiatan BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan												
		Subject Matter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	PENDATAN POTENSI DESA													
2	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN	SOSIAL												
3	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN	SOSIAL												
4	SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI	SOSIAL												
5	UJI COBA PODES 2021	SOSIAL												
6	PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SLHI)	SOSIAL												
7	PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN	SOSIAL												
8	SURVEI PENGUKURAN TINGKAT KEBAHAGIAAN (SPTK)	SOSIAL												
9	SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI	SOSIAL												
10	SURVEI PERTANIAN TERINTEGRASI	PRODUKSI												
11	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN	PRODUKSI												
12	PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA	PRODUKSI												
13	PERSIAPAN SENSUS PERTANIAN	PRODUKSI												
14	SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH	PRODUKSI												
15	SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP	PRODUKSI												
16	SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN	PRODUKSI												
17	SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN	PRODUKSI												
18	SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN	PRODUKSI												
19	SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TAHUNAN	PRODUKSI												
20	SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN	PRODUKSI												

No.	Kegiatan	Subject Matter	Pelaksanaan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
21	SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	PRODUKSI													
22	SURVEI KONSTRUKSI	PRODUKSI													
23	SURVEI HORTIKULTURA	PRODUKSI													
24	PENGUMPULAN DATA KEHUTANAN	PRODUKSI													
25	SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN	PRODUKSI													
26	SURVEI PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH	DISTRIBUSI													
27	SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN	DISTRIBUSI													
28	INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	DISTRIBUSI													
29	SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR	DISTRIBUSI													
30	SURVEI HARGA KONSUMEN DAN SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS	DISTRIBUSI													
31	SURVEI HARGA PERDESAAN	DISTRIBUSI													
32	STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERHA	DISTRIBUSI													
33	SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA	DISTRIBUSI													
34	SURVEI BIAYA HIDUP	DISTRIBUSI													
35	SURVEI HARGA KONSUMEN	DISTRIBUSI													
36	SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN GABAH (HPG)	DISTRIBUSI													
37	SURVEI HARGA KONSUMEN PERDESAAN (HKD)	DISTRIBUSI													
38	SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN PERTANIAN (HPT)	DISTRIBUSI													
39	SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN BERAS DI PENGGILINGAN (HPBG)	DISTRIBUSI													
40	SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN JASA (HPJ)	DISTRIBUSI													
41	SURVEI HARGA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (SHPI)	DISTRIBUSI													
42	SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG DAN JASA	DISTRIBUSI													
43	SURVEI TRANSPORTASI	DISTRIBUSI													

No.	Kegiatan	Subject Matter	Pelaksanaan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
44	SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA (STKU)	DISTRIBUSI													
45	SURVEI KARAKTERISTIK USAHA	DISTRIBUSI													
46	SURVEI E-COMMERCE														
47	STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN	DISTRIBUSI													
48	PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010:100 (SKTNP BARANG)	NERACA													
49	PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA JASA TIWULANAN 2010:100 (SKTNP JASA)	NERACA													
50	PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB	NERACA													
51	SURVEI KHUSUS NERACA PRODUKSI	NERACA													
52	SURVEI KHUSUS SEKTOR JASA	NERACA													
53	SURVEI KHUSUS KONSUMSI RUMAH TANGGA (SKKRT)	NERACA													
54	SURVEI KHUSUS TABUNGAN DAN INVESTASI RUMAH TANGGA	NERACA													
55	SURVEI MATRIK ARUS KOMODITAS	NERACA													
56	SURVEI KHUSUS STUDI PENYUSUNAN PERUBAHAN INVENTORI (SKSPPI)	NERACA													
57	SURVEI KHUSUS PERUSAHAAN SWASTA (SKPS)	NERACA													
58	SURVEI KHUSUS LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	NERACA													
59	SURVEI KHUSUS STRUKTUR INPUT PEMERINTAH (SKSIP)	NERACA													
60	UPDATING DIREKTORI LNPRT	NERACA													
61	SURVEI KHUSUS LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA TAHUNAN	NERACA													

Lampiran 11. *Advanced Release Calender (ARC)* Publikasi BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	26 Februari 2021	Rilis
2	Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2021	Tahunan	Indonesia	26 Februari 2021	Rilis
3	Indeks Harga Konsumen Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	01 Maret 2021	Rilis
4	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	Tahunan	Indonesia dan Inggris	05 April 2021	Rilis
5	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan IV 2020	Triwulanan	Indonesia	15 Maret 2021	Rilis
6	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	Tahunan	Indonesia dan Inggris	05 April 2021	Rilis
7	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV 2020	Triwulanan	Indonesia	15 Maret 2021	Rilis
8	Statistik Perumahan Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	23 April 2021	Rilis
9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	27 April 2021	Rilis
10	Infografis BRS BPS Provinsi Aceh Tahun 2020	Tahunan	Indonesia	27 April 2021	Rilis
11	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh Agustus 2020	Tahunan	Indonesia	30 April 2021	Rilis
12	Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	30 April 2021	Rilis
13	Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	11 Juni 2021	Rilis

No	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha Triwulan I 2021	Triwulanan	Indonesia	15 Juni 2021	Rilis
15	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan I 2021	Triwulanan	Indonesia	15 Juni 2021	Rilis
16	Statistik Transportasi Udara dan Laut Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	25 Juni 2021	Rilis
17	Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020	Tahunan	Indonesia	30 Juni 2021	Rilis
18	Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	30 Juli 2021	Rilis
19	Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Februari 2021	Tahunan	Indonesia	30 Juli 2021	Rilis
20	Direktori Hotel Bintang dan Akomodasi Lainnya Provinsi Aceh 2021	Tahunan	Indonesia	28 Agustus 2021	Rilis
21	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2021	Triwulan	Indonesia	15 September 2021	Rilis
22	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan II 2019	Triwulan	Indonesia	15 September 2021	Rilis
23	Statistik Daerah Provinsi Aceh 2021	Tahunan	Indonesia	26 September 2021	Rilis
24	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Akomodasi Lainnya Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	16 Oktober 2021	Rilis
25	Master File Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2021	Tahunan	Indonesia	29 Oktober 2021	Rilis

No	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Tahun 2021	Tahunan	Indonesia	09 November 2021	Rilis
27	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2021	Tahunan	Indonesia	30 November 2021	Rilis
28	Statistik Industri Mikro dan Kecil Provinsi Aceh 2020	Tahunan	Indonesia	28 Desember 2021	Tunda Rilis
29	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha Triwulan III 2021	Triwulanan	Indonesia	15 Desember 2021	Rilis
30	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan III 2021	Triwulanan	Indonesia	15 Desember 2021	Rilis
31	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2021	Tahunan	Indonesia dan Inggris	31 Desember 2021	Rilis
32	Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Agustus 2021	Tahunan	Indonesia	30 Desember 2021	Rilis

Lampiran 12. Daftar Metadata Kegiatan Statistik Sektor dan Khusus yang disampaikan K/L/D/I kepada BPS Provinsi Aceh Tahun 2021

No.	OPD Pelaksana	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1	Pengadilan Negeri Banda Aceh	Kompilasi data administrasi tenaga pengadilan se-Provinsi Aceh	2020
2	Dinas Sosial	Kompilasi Administrasi Panti Asuhan Anak Asuh di Provinsi Aceh	2020
3	Dinas Kesehatan	Kompilasi Administrasi Fasilitas Kesehatan Aceh	2020
		Kompilasi Administrasi Tenaga Kesehatan di Provinsi Aceh	2020
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kompilasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Aceh	2020
5	Perum Bulog	Kompilasi Data Rencana Pengadaan dan Realisasi Penyaluran Beras di Aceh	2020
6	Dinas Pendidikan	Kompilasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Aceh	2020
7	PLN	Kompilasi Data Pelanggan PLN Aceh	2020
8	Sekretariat DPRA	Kompilasi Data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	2020
9	Dinas Peternakan	Kompilasi Administrasi Peternakan Aceh	2020
10	RSJ	Kompilasi Administrasi Data Rumah Sakit Jiwa Aceh	2020
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kompilasi Administrasi Tanaman Perkebunan Aceh	2020
		Kompilasi Administrasi Luas Tanam dan Luas Panen Hortikultura Aceh	2020
		Kompilasi Administrasi Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Aceh	2020
12	BKSDA Aceh	Kompilasi Administrasi Lokasi dan Luas	2020

No.	OPD Pelaksana	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
		Suaka Alam/Objek Wisata Alam	
13	Dinas Kekayaan Aceh	Kompilasi Realisasi Pendapatan Pemerintah Aceh	2020
14	Disnakermobduk	Kompilasi Administrasi Informasi Pasar Kerja Aceh	2020

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STAISTIK PROVINSI ACEH

BPS – Statistics of Aceh Province

Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh, No. 50, Banda Aceh, 23121

(0651) 2300

aceh.bps.go.id